

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# Maksud danTujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidak pastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan; dan
8. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bag I paapengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

* 1. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
  2. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
  3. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  4. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
  5. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
  6. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

# Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan selanjutnya diubah lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
13. Peraturan Walikota Nomor 54a Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diganti dengan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Walikota Nomor 55a Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diganti dengan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

# Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto :

Bab I : Pendahuluan

* 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
  2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
  3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

Bab II : Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

2.1 Domisili dan bentuk hokum suatu entitas serta juris diksitempatentitas.

2.2 Sifat operasientitas dan kegiatan pokoknya.

2.3 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.

Bab III : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

APBD

* 1. Ekonomi Makro;
  2. Kebijakan Keuangan;
  3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD;

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

* 1. Entitas pelaporan keuangan daerah;
  2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
  3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
  4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrual.
  5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
     1. Aset Lancar
        1. Akuntansi Kasda Setara Kas
        2. Akuntansi Investasi Jangka Pendek
        3. Akuntansi Piutang
        4. Akuntansi Persediaan
     2. Aset Non Lancar
        1. Akuntansi Investasi Jangka Panjang
        2. Akuntansi Aset Tetap
        3. Akuntansi Dana Cadangan
        4. Akuntansi Aset Lainnya
  6. Akuntansi Kewajiban
  7. Akuntansi Ekuitas Dana
  8. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Bab V : Penjelasan Pos-posLaporanKeuangan

* 1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
     1. Pendapatan - LRA
     2. Belanja
     3. Pembiayaan
  2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
  3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan - LO

5.3.2. Beban

5.3.3. Kegiatan Non Operasional

5.3.4. Pos Luar Biasa

* 1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
     1. Aset
     2. Kewajiban
     3. Ekuitas
  3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

5.6.1 Arus Kas dari Operasi

5.6.2 Arus Kas dari Invenstasi Aset Non Keuangan

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

* + 1. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bab VI : Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

* 1. Informasi Tambahan
  2. Pengungkapan Lainnya
     1. Domisili
     2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
     3. Struktur Organisasi

Bab VII : Penutup

**BAB II**

**Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan**

**dan Entitas Akuntansi**

**2.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdis serta tempat entitas**

a) Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah otonom di Propinsi Jawa Timur yang tercatat berpenduduk sebanyak 142.703 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 7.294 penduduk/km2 pada Tahun 2016 dengan luas wilayah lebih dari 16,46 km2, yang terletak diantara 7° 27’0.16” sampai 7° 29’37.11” Lintang Selatan dan 112027’24” Bujur Timur dengan kondisi permukaan tanah agak miring keTimur dan Utara antara 0 – 3 % serta dengan ketinggian rata-rata +/- 22 m di atas permukaan laut. Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kota Mojokerto hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

b) Batas Wilayah Administrasi Kota Mojokerto

Batas wilayah Kota Mojokerto sebagai berikut :

* Utara berbatasan dengan Sungai Brantas yang membentang memisahkan wilayah Kota dengan Kabupaten Mojokerto;
* Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
* Barat dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

c) Pembagian dan Kebijakan Perwilayahan

Secara administrative Kota Mojokerto terbagi dalam 3 Kecamatan, 18 Kelurahan, 661 Rukun Tetangga, 177 Rukun Warga dan 70 Dusun/Lingkungan. Kota Mojokerto merupakan satu-satunya daerah di JawaTimur, bahkan di Indonesia yang memiliki satuan wilayah maupun luas wilayah terkecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

* 1. **Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.**

Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya adalah sebagai

berikut :

* 1. Kegiatan-kegiatan pokok yang terdapat pada SEKRETARIAT DPRD,terdiri atas :

1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota ;
2. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

* Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
* Penyelenggaran administrasi keuangan DPRD ;
* Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ;
* Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
  1. Kegiatan Pokok terdapat pada Staf Ahli terdiri dari :

1. Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli ;
2. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya ;
3. Dalam pelaksanaan tugas, secara administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah ;
4. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil ;
5. Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4) diatas terdiri dari 5 (lima) orang staf ahli yaitu :
   1. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik ;
   2. Staf Ahli bidang Pemerintahan ;
   3. Staf Ahli bidang Pembangunan;
   4. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
   5. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
6. Tiap-tiap Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut :
   1. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik ;
   2. Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan ;
   3. Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan ;
   4. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumberdaya manusia ;
   5. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.
7. Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah Kota bersifat konsultasi dan koordinasi.
   1. **Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional**

**Landasan Hukum**

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntandi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Thun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

**BAB III**

**Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan**

**Pencapaian Target Kinerja APBD**

* 1. **Ekonomi Makro**

Kebijakan otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Yang pertama, otonomi daerah merupakan jawaban atas permasalahan lokal yang dialami bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan serta rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, desentralisasi merupakan langkah strategis untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan perekonomian daerah akan tumbuh semakin kuat dan mandiri. Sementara itu, keberhasilan perekonomian daerah akan sangat ditentukan oleh harmonisasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di daerah. Kebijakan fiskal daerah yang termanifestasikan melalui APBD dan perpajakan daerah harus didukung dengan kebijakan moneter melalui neraca pembayaran daerah dan perbankan daerah yang sehat dan kuat.

Dalam konteks otonomi daerah dan kebijakan fiskal di daerah, maka untuk melihat kondisi makro ekonomi Daerah dapat dideskripsikan melalui beberapa variabel, meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
3. Perkembangan ekonomi sektoral, seperti pertanian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa perusahaan, serta perbankan daerah;
4. Laju inflasi di daerah (perkembangan harga-harga di daerah);
5. Arus masuk investasi di daerah; dan
6. APBD (Keuangan pemerintah daerah).

Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada Tahun 2010-2016 menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup positif. Selama Tahun 2016, kegiatan ekonomi di Kota Mojokerto menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 5,77 persen (harga konstan Tahun 2010). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu sebesar 5,76 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,77 persen lebih lambat dibanding Tahun 2014 yaitu 5.83 persen dan inflasi dari PDRB Kota Mojokerto Tahun 2016, akan menjadi titik harapan untuk perbaikan ekonomi Kota Mojokerto di masa mendatang. Namun pertumbuhan sebesar itu juga masih menjadi problematika dengan tetap tingginya besaran inflasi PDRB yang melebihi pertumbuhan ekonominya walaupun sudah relatif kecil, pertumbuhan ekonomi 5,77 persen sementara inflasi PDRB 3,67 persen. Hal ini bisa dikatakan bahwa upaya pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah mendekati apa yang diharapkan. Akan tetapi dengan inflasi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, tingkat daya beli masyarakat masih relatif rendah dan

belum bisa mengikuti perkembangan harga-harga kebutuhan pokok yang merangkak naik.

Pertumbuhan pada 2016 ditinjau dari struktur produksi sektoral, pertumbuhan yang terjadi sudah mencerminkan fondasi yang menggembirakan bagi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, pada pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan masih turun sebesar 0,51 persen sektor yang mempunyai keterkaitan hulu-hilir (*backward-forward*) terbesar. Kenaikan sektoral terbesar pada Tahun 2016 terjadi pada sektor Listrik, Gas dan Air Bersih1.89 persen. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel III.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2010 - 2016 (%)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016\*\* |
| 1. Pertanian | 1,70 | (4,83) | 4,64 | 3,00 | 0,59 |
| 1. PertambangandanPenggalian | - | - | - | - | - |
| 1. IndustriPengolahan | 3,47 | 4,75 | 6,01 | 6,06 | 5,55 |
| 1. Listrik, Gas dan Air Bersih | 10,79 | 0,93 | 1,03 | 1,73 | 3,62 |
| 1. Pengadaanair,pengelolaan sampah,limbah daur ulang | 3,60 | (2,32) | (0,20) | 2,47 | (0,02) |
| 1. Bangunan/Konstruksi | 5,52 | 6,12 | 6,02 | 3,55 | 5,23 |
| 1. Perdagangan besar & eceran | 7,26 | 6,55 | 5,72 | 5,81 | 5,51 |
| 1. Transportasi & pergudangan | 3,22 | 3,19 | 3,89 | 5,30 | 3,87 |
| 1. Penyediaan akomodasi | 5,94 | 4,41 | 6,26 | 6,28 | 5,64 |
| 1. Informasi & Komunikasi | 8,47 | 7,89 | 7,87 | 7,53 | 7,71 |
| 1. Jasa Keuangan & Asuransi | 7,24 | 9,02 | 6,27 | 5,97 | 7,43 |
| 1. Real Estate | 6,74 | 6,69 | 4,72 | 4,29 | 5,24 |
| 1. Jasa Perusahaan | 4,78 | 5,46 | 7,09 | 5,56 | 5,81 |
| 1. Administrasi Pemerintahan,Pertahanan, Jaminan Sosial | 3,73 | 2,38 | 0,90 | 5,76 | 3,19 |
| 1. Jasa Pendidikan | 3,35 | 7,99 | 5,09 | 6,42 | 5,92 |
| 1. Jasa Kesehatan | 11,25 | 8,19 | 8,32 | 3,09 | 6,53 |
| 1. Jasa Lainnya | 3,97 | 6,31 | 5,53 | 4,99 | 5,20 |
| PDRB | 6,09 | 6,20 | 5,83 | 5,74 | 5,77 |

*Sumber :BPS Kota Mojokerto*

Secara visual, gambaran pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto atas dasar harga konstan Tahun 2000 secara sektoral diperlihatkan pada gambar berikut.

**Gambar III.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto**

**Tahun 2010-2016 (%)**

Secara garis besar, kondisi perekonomian Kota Mojokerto dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang sulit dikendalikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, antara lain tingkat suku bunga umum, nilai tukar rupiah, inflasi, harga minyak dunia, kebijakan moneter dll.Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari lingkungan internal Kota Mojokerto yang relatif dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, antara lain berupa kondisi keamanan, Perda-perda, kondisi infrastruktur dll.

Semakin membaiknya kondisi ekonomi makro yang ditandai antara lain stabilitas nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi, dan stabilitas suku bunga bank dalam negeri akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mendorong lebih berkembangnya sektor riil, terutama usaha kecil dan menengah yang banyak berkembang di Kota Mojokerto.

* 1. **Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kota Mojokerto sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Arus Kas adalah bagian dari upaya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dengan tetap memperhatikan unsur rasionalitas sesuai perkembangan yang ada dalam kaitannya dengan tingkat pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan prosedur dan mekanisme tata laksana kerja secara berkesinambungan.

Kerangka pendapatan daerah Tahun 2016, berdasarkan rencana-rencana kebijakan pemerintah maupun analisa prediksi peningkatan pajak daerah diproyeksikan sebagai berikut:

* + - 1. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan setelah perubahan APBD bertambah sebesar Rp19.591.097.900,00 menjadi Rp141.627.624.400,00 atau 16,05% yang berasal dari proyeksi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
      2. Dana Perimbangan diproyeksikan setelah perubahan APBD berkurang sebesar Rp13.466.847.420,00 menjadi Rp598.449.526,00 atau berkurang 2.20% yang berasal dari proyeksi kenaikan dana bagi hasil pajak/non pajak, DAU dan DAK.
      3. Proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan APBD bertambah sebesar Rp7.962.454.500,00 menjadi Rp106.678.345.000,00 atau bertambah 8,07% yang berasal dari proyeksi dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah yang lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari propinsi/kabupaten/kota lainnya.

Selanjutnya terhadap aspek belanja, bahwa belanja daerah diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dalam APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, fokus, ada komitmen, partisipatif, terobosan, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan ditempuhnya kebijakan keuangan oleh Pemerintah Kota Mojokerto sehingga menimbulkan terjadinya perubahan posisi neraca dan laporan arus kas adanyaketerkaitan antara program dan kegiatan sejalan dengan kebijakan daerah yang diarahkan pada upaya-upaya sebagai berikut:

1. peningkatan koperasi, industri rumah tangga, serta usaha/industri kecil dan menengah, yang pada dasarnya merupakan pilar utama pembangunan ekonomi daerah;
2. upaya mempertahankan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana umum daerah, yang dititikberatkan pada kegiatan pemeliharaan prasarana dasar, dalam rangka menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
3. upaya nyata untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah daerah, dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, Pemerintah Kota Mojokerto telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan yang berfungsi selain dapat mendukung peningkatan PAD juga secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti program sapi kereman dan lain-lain.
2. Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata daerah. Hal ini sangat penting karena selain dapat meningkatkan PAD juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat
3. Peningkatan kinerja dan disiplin aparat yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan-kebijakan tersebut diatas ditempuh oleh Pemerintah Kota Mojokerto karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu:

1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat termasuk didalamnya wajib pajak dan retribusi terhadap kewajibannya
2. Rendahnya daya saing produksi lokal terhadap produksi luar negeri sehingga mempengaruhi produksi dalam negeri.
   1. **Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang tercermin dalam indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 menurut urusan pemerintahan daerah dan SKPD Pengguna Anggaran dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**TabelIII.2 Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Menurut Urusan Pemerintahan**





Mencermati tabel perbandingan di depan, dapat dikatakan bahwa secara umum, indikator pencapaian target kinerja SKPD menunjukkan *trend* efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing SKPD pada Tahun Anggaran 2016 jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja Tahun Anggaran sebelumnya. Beberapa indikator target kinerja yang dapat diklaim telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu adanya peningkatan menuju terciptanya Kota Mojokerto yang aman, damai, adil, demokratis serta kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor pendorong tingkat keberhasilan tercapainya efektivitas dan efisiensi atau faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kecenderungan penurunan moralitas dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Tingginya kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja;
3. Sinkronisasi pengembangan pendidikan yang dilakukan dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja;
4. Kemampuan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan umum berkaitan dengan kemampuan ekonomi;
5. Rendahnya daya saing usaha kecil, menengah dan rumah;
6. Cukup banyaknya jumlah keluarga miskin;
7. Terbatasnya sarana dan prasarana perkotaan yang tersedia untuk menunjang aktifitas kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat;
8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi;
9. Kesadaran masyarakat dalam memahami nilai-nilai demokrasi; dan
10. Belum tuntasnya masalah genangan air.

**BAB IV**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

* 1. **Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan selanjutnya diubah lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, proses akuntansi dan penatausahaan keuangan di daerah dilakukan dengan desentralisasi yang membedakan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan.Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto terdiri dari:

* 1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
  4. Dinas Pekerjaan Umum;
  5. Badan Perencanaan Pembangunan;
  6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  8. Kantor Lingkungan Hidup;
  9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  10. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
  11. Dinas Sosial;
  12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  13. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;.
  14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  15. Satuan Polisi Pamong Praja;
  16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  17. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  18. Sekretariat Daerah, yang terdiri dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Umum, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
  19. Sekretariat DPRD;
  20. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  21. Badan Penelitian dan Pengembangan;
  22. Badan Kepegawaian;
  23. Inspektorat;
  24. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
  25. Kecamatan Prajurit Kulon;
  26. Kecamatan Magersari;
  27. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
  28. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
  29. Dinas Pertanian.
  30. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Sedangkan yang dimaksud dengan entitas pelaporan adalah unit Pemerintah Kota Mojokerto yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi san menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Mojokerto, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah kota Mojokerto, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

Dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal :

* 1. Aset ;
  2. Kewajiban ;
  3. Ekuitas ;
  4. Pendapatan ;
  5. Belanja ;
  6. Pembiayaan ; dan
  7. Arus Kas.
  8. **Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan daerah adalah basis akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Kebijakan akuntansi dengan menggunakan basis akrual ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

(1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

(3) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:

a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP

b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP

* 1. **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Karena kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

* 1. **Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrual**

Dengan adanya perubahan penggunaan basis akuntansi dari basis kas atau kas modifikasian menjadi basis akrual terdapat hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, antara lain :

1. Menetapkan Peraturan Walikota Nomor 54a Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diganti dengan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 55a Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diganti dengan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang mengimplementasikan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;
2. Memiliki Sistem informasi akuntansi dan aplikasinya yang memadai ;
3. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan berupa sosialisasi dan bimbingan teknis tentang aturan-aturan baru yang mendasari penerapan basis akrual pada para pelaksana pengelolaan keuangan di seluruh SKPD dan aplikasi keuangannya yang menerapkan basis akrual.
   1. **Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Stándar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54a Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah diganti menjadi Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, antara lain:

* + - 1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.

1. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
2. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas , maksudnya pendapatan dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kota Mojokerto tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
3. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
4. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
5. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
6. Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.
7. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.
8. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
9. Laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
10. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional (LO);

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
2. Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.
3. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
4. nama SKPD/PPKD/PEMDA;
5. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
6. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
7. mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
8. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
   * + 1. **Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dimana Rekening Kas Umum Daerah merupakan rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Selanjutnya terdapat hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :
2. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
3. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
4. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
5. informasi lainnya yang dianggap perlu.
   * + 1. **Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dan Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

* + - 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
      2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kota Mojokerto dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daeah dan penerimaan kas ;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi ;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro ;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan) ;
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD adalah :

1. Pendapatan Transfer, merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang telah mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
2. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Namun Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD adalah:

Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

1. PAD Melalui Penetapan, yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
2. PAD Tanpa Penetapan, kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakuiketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
3. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan, pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

* + 1. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

* + 1. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

1. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

1. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

* + - 1. **Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

* 1. Belanja Operasi
  2. Belanja Modal
  3. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

* + - 1. **Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik, yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

Beban diakui pada:

1. Saat timbulnya kewajiban, saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
2. Saat terjadinya konsumsi aset, saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mojokerto, pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

1. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
2. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
3. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
4. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
5. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
6. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak).

* + - 1. **Kebijakan Akuntansi Transfer**

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer beban/beban transfer sesuai BAS. Untuk penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Dan untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah. Dan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Sedangkan untuk penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

* + - 1. **Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Selanjutnya Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Dan selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Dan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

* + 1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan
    2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
       1. **Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi:

1. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan serta tidak dijaminkan.
2. Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
3. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas atau setara kas.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

1. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
2. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Berikut rincian kas dan setara kas :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kas | Kas di Kas Daerah | Kas di Kas Daerah |
|  |  | Potongan Pajak dan Lainnya |
|  |  | Kas Transitoris |
|  |  | Kas Lainnya |
|  | Kas di Bendahara Penerimaan | Pendapatan Yang Belum Disetor |
|  |  | Uang Titipan |
|  | Kas di Bendahara Pengeluaran | Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU |
|  |  | Pajak di SKPD yang Belum Disetor |
|  |  | Uang Titipan |
|  | Kas di BLUD | Kas Tunai BLUD |
|  |  | Kas di Bank BLUD |
|  |  | Pajak yang Belum Disetor BLUD |
|  |  | Uang Muka Pasien RSUD/BLUD |
|  |  | Uang Titipan BLUD |
| Setara Kas | Deposito (kurang dari 3 bulan) | Deposito (kurang dari 3 bulan) |
|  | Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan) | Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan) |

Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

* + - 1. **Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan. Sedangkan deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Suatu Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh oleh pemerintah daerah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat dapat diukur secara memadai (*realiable*).

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash devidend*) dicatat sebagai pendapatan.

* + - 1. **Kebijakan Akuntansi Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Piutang berdasarkan pungutan diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

1. Telah diterbitkan surat ketetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan/atau;
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2. jumlah piutang dapat diukurdengan andal.

Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment,* Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi.Piutang Retribusi Daerah pada akhir periode pelaporan diakui berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
2. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Piutang dicatat dan diukur sebesar:

1. Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
2. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
4. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

1. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

1. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

1. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kota;
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);
2. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment).

Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down)*. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet

Yang bisa dirinci sebagai berikut sesuai dengan jenis/kelompok piutang, sebagai berikut :

| **No** | **Uraian** | **Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **< 1** | **≥1s.d<2** | **≥2s.d<3** | **≥3s.d<5** | **≥5** |
| 1 | Piutang Pajak Daerah | Lancar | KL | R | R | Macet |
| 2. | Piutang Retribusi | Lancar | KL | R | Macet | Macet |
| 3 | Bagian Laba BUMN/D | Lancar | KL | R | Macet | Macet |
| 4 | Biaya Dibayar di Muka | Lancar | KL | R | Macet | Macet |
| 5 | Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi | Lancar | K L | R | Macet | Macet |
| 6 | Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran | Lancar | K L | R | Macet | Macet |
| 7 | Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman | Lancar | K L | R | Macet | Macet |
| 8 | Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan | Lancar | K L | R | Macet | Macet |
| 9 | Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa | Lancar | K L | R | Macet | Macet |
| 10 | Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR | Lancar | K L | R | Macet | Macet |
| 11 | Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntan Perbendaharaan | Lancar | K L | R | Macet | Macet |
| 12 | Piutang Lain-Lain | Lancar | K L | R | Macet | Macet |

Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya. Kebijakan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih pada Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

| **No** | **Uraian** | **Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **< 1** | **≥1s.d 2** | **> 2 s.d 3** | **> 3 s.d 5** | **>5** |
| 1 | Piutang Pajak Daerah | 0 % | 20 % | 40 % | 70 % | 100% |
| 2 | Piutang Retribusi | 0 % | 40 % | 70 % | 100% | 100% |
| 3 | Bagian Laba BUMN/D | 0 % | 10 % | 30 % | 60 % | 100% |
| 4 | Biaya Dibayar di Muka | 0 % | 5 % | 30 % | 60 % | 100% |
| 5 | Piutang Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Provinsi | 0 % | 20 % | 40 % | 70% | 100% |
| 6 | Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran | 0 % | 20 % | 40 % | 60% | 100% |
| 7 | Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman | 0 % | 10 % | 30 % | 60% | 100% |
| 8 | Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan | 0 % | 10 % | 30 % | 60% | 100% |
| 9 | Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa | 0 % | 10 % | 30 % | 60% | 100% |
| 10 | Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR | 0 % | 10 % | 30 % | 60% | 100% |
| 11 | Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntan Perbendaharaan | 0 % | 10 % | 30 % | 60% | 100% |
| 12 | Piutang Lain-Lain | 0 % | 10 % | 30 % | 60% | 100% |

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan pada akun Cadangan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara

1. Penghapustagihan (write-off)

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dankebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintahsecara hukum dan ekonomik.Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara,untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kreditUKM yang tidak mampu membayar.
2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadilebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusandenda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling danpenurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkinditerapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan,dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry(misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukumpajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telahdiputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (writedownmaupun write off) masuk *esktrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnyakesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicilteratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel.*
8. Penghapusbukuan (write down)

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value-*nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatanpenagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakandokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :

1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugianpenghapusbukuan.
2. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansidan entitas pelaporan.
3. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
4. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang takmungkin terealisasi tagihannya.
5. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan padaneraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepadapengambil keputusan penghapusbukuan.
6. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yangberwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*).Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidakberinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulanberjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
   * + 1. **Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kategori Persediaan antara lain terdiri dari :

1. Persediaan alat tulis kantor
2. Persediaan alat listrik;
3. Persediaan material/bahan;
4. Persediaan benda pos;
5. Persediaan bahan bakar; dan
6. Persediaan bahan makanan pokok.

Persediaan diakui pada saat :

1. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Khusus untuk Dinas Kesehatan pemakaian beban persediaan obat pada diakui ditingkat Puskesmas Induk. Dan pada RSUD pemakaian beban persediaan obat diakui pada Depo Obat yang terdiri dari empat depo obat, yaitu:

1. Depo obat Instalasi Bedah Sentral
2. Depo obat Instalasi Gawat Darurat (IGD)
3. Depo obat Instakasi Rawat Inap (IRNA)
4. Depo obat Instalasi Rawat Jalan (IRJ)

Dan pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

1. Metode Perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.
2. Metode Periodik, metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

* + - 1. **Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar**

Aset Non lancar yang dapat dijelaskan dalam penjabaran ini adalah aset yang bukan merupakan kategori Lancar namun juga bukan kategori aset tetap. Aset Non lancar yang dijelaskan dibawah ini adalah Dana Cadangan. Dan kebijakan akuntansi adalah sebagai berikut :

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Dana cadangan ini dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar dan disajikan dengan nilai Rupiah serta dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan.

Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan Laporan Operasional (LO). Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

* + - 1. **Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
2. Investasi Jangka Panjang Permanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa :

* + 1. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkanuntuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
    2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkankepada pihak ketiga;
    3. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakatseperti bantuan modal kerja secara bergulir (dana bergulir) kepada kelompok masyarakat;
    4. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untukdimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi permanen adalah investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan / atau pengaruh yang sigfikan dalam jangka panjang dan / atau menjaga hubungan kelembagaan.Investasi Permanen dapat berupa:

1. Penyertaan Modal Pemerintah pada perushaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentu saham pada perusahaan yang bukan perseroan;
2. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

* + 1. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
    2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*realible*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehan.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Investasi jangka panjang nonpermanen:

1. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
2. Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
3. Investasi jangka panjang nonpermanent dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga.

Investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

1. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

1. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya *(aging schedule)*.Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

| **No** | **Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi** | **Persentase Penyisihan** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun | 0 % |
| 2 | Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun | 30 % |
| 3 | Jatuh tempok pada periode 3 s.d 4 Tahun | 60 % |
| 4 | Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun | 100 % |

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
4. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

* + - * 1. Dana Tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
        2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
        3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
        4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
        5. Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan daba bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir.

Pengeluaran Dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka Dana Bergulir.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulirberdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar nilai perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.Agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir. Penatausahaan dan penyajian selayaknya akun Piutang perlu diterapkan dengan mengelompokkan umur dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan nilai yang dapat direalisasikan atas dana bergulir.

Alat untuk menyesuaikan niali Investasi Non Permanen Dana Bergulir adalah dengan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih.

Kebijakan Akuntansi penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:

* + - * 1. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Investasi Non Permanen Dana Bergulir berdasarkan umur Investasi Non Permanen Dana Bergulir.
        2. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya Investasi Non Permanen Dana Bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat tertagih.
        3. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diarugkan Tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu denga melaukan analisa atas umur saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih *out standing* padaakhir periode pelaporan.
        4. Saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih *out standing* padaakhir periode pelaporan dapat diperoleh jika satuan kerja pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai jatuh temponya (*aging scedule*)

Berdasarkan penataushaan tersebut, akan diketahui:

* + 1. Jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih,
    2. Jumlah dana Bergulir yang masuk kategri diragukan dapat ditagih, dan
    3. Jumlah dan bergulir yang dapat ditagih.

Kebijakan penetapan *Aging Schedule* dengan tingkat/kategori kolektibilitasnya Dana Bergulir dan perhitungan *net realizable value*-nya adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Umur Tunggakan Dana Bergulir | Kategori Penyaluran Dana Bergulir | % Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih |
| 1 | 0 s.d 2 Bln | Lancar | 0 % |
| 2 | >2 Bln s.d 4 Bln | Kurang Lancar | 20 % |
| 3 | >4 Bln s.d 12 Bln | Diragukan | 60 % |
| 4 | >12 Bln | Macet | 100 % |

* + - 1. **Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Dan kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Masa manfaat adalah :

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
7. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
8. Pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal sudah selesai 100% pembangunannya dan siap digunakan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Jadi aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap adalah sebagai berikut :

1. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

1. Tanah, mencakup tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
2. Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Jalan, Irigasi , dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Aset Tetap Lainnya;, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Konstruksi dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. Pengukuran dapat dipertimbangkan secara andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung adalah :

1. Biaya Konstruksi Fisik, yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.
2. Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi, yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.
3. Biaya Pengawasan Konstruksi, yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.
4. Biaya Pengelolaan Kegiatan, yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan, mis :

* biaya perencanaan;
* biaya lelang;
* biaya persiapan tempat;
* biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
* biaya pemasangan (*instalation cost*);
* biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; danbiaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Sedangkan biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Dan biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Selanjutnya biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Kemudian biaya perolehan jalan, jaringan,dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Dam biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Aset Tetap, Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2019 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap diatur dapat dijabarkan sebagai berikut :

Aset tetap berikut tidak disusutkan, Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman tidak disusutkan. Penyusutan atas aset tetap akan mulai dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap dimulai sejak tahun perolehan, dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan. Dan Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

1. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumensumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
2. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
   * + 1. **Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Yang termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa : (a) Bangun, Kelola, Serah (BKS), dan (b) Bangun, Serah, Kelola (BSK). Kerjasama / Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/ kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Setelah masa pemanfaatan berakhir status penggunaannya ditetapkan oleh Pengelola Barang.
4. Aset Tidak Berwujud, adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. contoh aset tidak berwujud adalah *software* komputer (dapat dipisahkan dari *hardware*), lisensi dan *franchise*, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Dapat diidentifikasikan dan dikendalikan oleh entitas, (b) Mempunyai potensi manfaat ekonomi di masa yang akan dating, (c) Tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk seperti halnya aset tetap. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika : (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan, (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Aset tak berwujud di ukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat dimasa yang akan datang. Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali untuk Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus sesuai masa manfaat aset tak berwujud tersebut. Apabila masa manfaat Aset Tak Berwujud sulit diestimasi, maka perhitungan masa manfaat ditetapkan selama 4 tahun.
5. Aset Lain-lain, digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengukuti kebijakan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
   * + 1. **Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dimana Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur dan Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Dan Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran *(exchange transactions*)
2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas :

1. Utang kepada Pihak Ketigan antara lain : Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, Utang Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya
2. Utang Bunga, terdiri dari : Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari : Utang Bank, Utang Obligasi, Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Pemerintah Provinsi, Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain
4. Utang Beban
5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas :

1. Utang kepada Pihak Ketiga
2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Beban
5. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Beban, diakui pada saat :

1. beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
2. terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
3. barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Sedangkan utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan

keuangan apabila :

1. Barang yang dibeli sudah diterima, atau
2. Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
3. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan / serah terima.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban jangka adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :

1. Utang Dalam Negeri, terdiri dari : Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri – Obligasi dan Utang Jangka Panjang Lainnya.
2. Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

* + - 1. **Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

a. Ekuitas

b. Ekuitas SAL

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA. Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

1. **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

* 1. **Pendapatan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2020**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |  | **0** |

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2020, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar 0 sedangkan realisasinya adalah sebesar 0 atau sebesar 0 dari anggaran. Sedangkan realisasi pendapatan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0 atau sebesar 0. dari realisasi pendapatan tahun 2019.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan tahun 2020 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 dan 2019

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran TA 2020**  **(Rp)** | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** | **%** | **Realisasi TA 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**5.1.1.1Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Realisasi PAD TA 2020 sebesar 0. atau.0 % dari yang dianggarkan sebesar 0. Sedangkan realisasi PAD pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0 atau sebesar 0 dari realisasi tahun 2019. Rincian anggaran dan realisasi PAD tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran TA 2020**  **(Rp)** | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** | **%** | **Realisasi TA 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**5.1.1.1.1 Pajak Daerah**

Realisasi Pajak Daerah TA 2020 sebesar 0. Atau 0 .% dari yang dianggarkan sebesar 0 .Realisasi pajak daerah pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0. atau sebesar 0. dari realisasi tahun anggaran 2019. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Anggaran TA 2020**  **(Rp)** | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** | **%** | **Realisasi TA 2019**  **(Rp)** |
|  | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**5.1.1.1.2 Retribusi Daerah**

Realisasi Retribusi Daerah TA 2020 sebesar 0. Atau 0.% dari yang dianggarkan sebesar 0. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Anggaran 2020**  **(Rp)** | **Realisasi 2020**  **(Rp)** | **%** | **Realisasi 2019**  **(Rp)** |
|  | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 0. atau sebesar 0.% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Anggaran 2020** | **Realisasi 2020** | **%** | **Realisasi 2019** |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
|  | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Realisasi Lain2 PAD yag sah TA 2020 sebesar 0. Atau 0.% dari yang dianggarkan sebesar 0. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran 2020**  **(Rp)** | **Realisasi 2020**  **(Rp)** | **%** | **Realisasi 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**5.1.1.2 Pendapatan Transfer**

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 sebesar 0. Atau 0.% dari yang dianggarkan sebesar 0. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019, realisasi pendapatan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0. atau 0 Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer tahun 2020.

Tabel . Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran 2020**  **(Rp)** | **Realisasi 2020**  **(Rp)** | **%** | **Realisasi TA 2019**  **Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2020 sebesar 0. Atau 0.% dari yang dianggarkan sebesar 0.. Rincian transfer pemerintah pusat-dana perimbangan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel . Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran 2020**  **(Rp)** | **Realisasi 2020**  **(Rp)** | **%** | **Realisasi TA 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2020 sebesar 0. Atau 0.% dari yang dianggarkan sebesar 0. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya merupakan dana insentif daerah. Pendapatan dana insentif daerah merupakan dana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI yang bertujuan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada Pemerintah Kota Mojokerto dengan kriteria kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian dan kesejahteraan.

**5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

Anggaran untuk transfer dari pemerintah provinsi pada tahun 2020 adalah sebesar 0, sedangkan realisasinya sebesar 0. atau 0 dari yang dianggarkan. Rincian anggaran dan pendapatan transfer pemerintah provinsi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel . Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran 2020**  **(Rp)** | **Realisasi 2020**  **(Rp)** | **%** | **Realisasi TA 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan**

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2020 sebesar 0. Atau 0.% dari yang dianggarkan sebesar 0. Rincian bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel . Rincian Bantuan Keuangan

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran 2020**  **(Rp)** | **Realisasi 2020**  **(Rp)** | **%** | **Realisasi TA 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Realisasi Lain2 Pendapatan yang sah TA 2020 sebesar 0 atau 0 % dari yang dianggarkan sebesar 0.Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan hibah dana BOS Nasional untuk satuan pendidikan. Rincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2020, yaitu:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran 2020**  **(Rp)** | **Realisasi 2020**  **(Rp)** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

* 1. **Belanja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2020**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2019**  **(Rp)** |
|  | **5.385.357.194** |  | **4.694.751.742** |  | **6.975.499.438** |

Realisasi Belanja TA 2020 sebesar **Rp**. **4.694.751.742** atau **87,18 %** dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 5.385.357.194** Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami Penurunan sebesar **Rp. 2.280.747.696** atau sebesar **67,30 %** Rincian anggaran dan belanja daerah tahun 2020, yaitu:

1. Tabel . Anggaran dan Realisasi Belanja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Anggaran TA 2020**  **(Rp)** | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** | **%** | **Realisasi TA 2019**  **(Rp)** |
| 1 | Belanja Operasi | 5.344.093.419,00 | 4.654.172.392,00 | 87,09 | 6.860.849.438,00 |
| 2 | Belanja Modal | 41.263.775,00 | 40.579.350,00 | 98,34 | 114.650.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **5.385.357.194,00** | **4.694.751.742,00** | **87,18** | **6.975.499.438** |

**5.1.2.1 Belanja Operasi**

Realisasi Belanja Operasi TA 2020 sebesar **Rp**. **4.654.172.392,00** atau **87,09.%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp.** **5.344.093.419,00**.Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2020.

Tabel . Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran TA 2020** | **Realisasi TA 2020** | **%** | **Realisasi TA 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Belanja Operasi | 5.344.093.419.00 | 4.654.172.392,00 | 87,09% | 6.860.849.438,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **5.344.093.419,00** | **4.654.172.392,00** | **87,09 %** | **6.860.849.438,00** |

**5.1.2.1.1 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp.2.820.866.603 atau 87,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3.233.714.194.yang terdiri dari:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran TA 2020** | **Realisasi TA 2020** | **%** | **Realisasi TA 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Belanja Pegawai | 3.233.714.194,00 | 2.820.866.603,00 | 87,23 | 2.835.381.358,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **3.233.714.194,00** | **2.820.866.603,00** | **87,23** | **2.835.381.358,00** |

**5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 sebesar **Rp.1.833.305.789,00** atau **86,87.%** dari yang dianggarkan sebesar Rp**2.110.379.225**.yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

| **No** | **Uraian** | **Anggaran TA 2020** | **Realisasi TA 2020** | **%** | **Realisasi TA 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Belanja Barang dan Jasa | 2.110.379.225,00 | 1.833.305.789,00 | 86,87 | 4.025.468.080 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **2.110.379.225,00** | **1.833.305.789,00** | **86,87** | **4.025.468.080** |

**5.1.2.1.3 Belanja Hibah**

Realisasi Belanja Hibah TA 2020 sebesar 0. Atau 0.% dari yang dianggarkan sebesar 0.dari anggaran yang telah ditetapkan, yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Anggaran TA 2020** | **Realisasi TA 2020** | **%** | **Realisasi TA 2019** |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
|  | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan

terjadinya resiko sosial. Pada tahun 2020, belanja bantuan sosial hanya terealisasi sebesar 0 atau sebesar 0. dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

| **No** | **Uraian** | **Anggaran TA 2020**  **(Rp)** | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** | **%** | **Realisasi TA 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**5.1.2.2 Belanja Modal**

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran belanja modal tahun 2020 adalah sebesar **Rp.41.263.775, 00** sedangkan realisasinya adalah sebesar **Rp.40.579.350** atau sebesar **98,34 %**. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2019, realisasi belanja modal pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar **35,40%.** Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2020:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran 2020** | **Realisasi 2020** | **%** | **Realisasi 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 100 | 105.150.000,00 |
| 2 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 15.763.775,00 | 15.079.350,00 | 95,66 | 9.500.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **41.263.775,00** | **40.579.350.00** | **98,34** | **114.650.000** |

**5.1.2.2.1 Belanja Tanah**

Realisasi belanja modal pengadaan tanah pada tahun 2020 sebesar 0.. merupakan belanja modal Tanah untuk 0.

**5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin**

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 25.500.000** atau sebesar **100.%**  dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 25.500.000** Terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran 2020** | **Realisasi 2020** | **%** | **Realisasi 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Pengadaan Alat-Alat Besar Darat |  |  |  |  |
| 2 | Pengadaan Alat-alat Bantu |  |  |  |  |
| 3 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor |  |  |  |  |
| 4 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor |  |  |  |  |
| 5 | Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor |  |  |  |  |
| 6 | Pengadaan Alat Bengkel Bermesin |  |  |  |  |
| 7 | Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin |  |  |  |  |
| 8 | Pengadaan Alat Ukur |  |  |  |  |
| 9 | Pengadaan Alat Pengolahan |  |  |  |  |
| 10 | Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan |  |  |  |  |
| 11 | Pengadaan Alat Kantor |  |  |  |  |
| 12 | Pengadaan Alat Rumah Tangga |  |  |  |  |
| 13 | Pengadaan Komputer |  |  |  |  |
| 14 | Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 100 | 105.150.000,00 |
| 15 | Pengadaan Alat Studio |  |  |  |  |
| 16 | Pengadaan Alat Komunikasi |  |  |  |  |
| 17 | Pengadaan Alat Kedokteran |  |  |  |  |
| 18 | Pengadaan Alat Kesehatan |  |  |  |  |
| 19 | Pengadaan Unit-Unit Laboratorium |  |  |  |  |
| 20 | Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah |  |  |  |  |
| 21 | Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika |  |  |  |  |
| 22 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika |  |  |  |  |
| 23 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup |  |  |  |  |
| 24 | Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan |  |  |  |  |
| 25 | Belanja Peralatan dan Mesin BOS |  |  |  |  |
| 26 | Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **25.500.000,00** | **25.500.000,00** | 100 | **105.150.000,00** |

**5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan**

Belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 0 atau sebesar 0. dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 0. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran 2020** | **Realisasi 2020** | **%** | **Realisasi 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja |  |  |  |  |
| 2 | Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan |  |  |  |  |
| 3 | Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu |  |  |  |  |
| 4 | Pengadaan Gedung dan Bangunan BOS |  |  |  |  |
| 5 | Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2020 adalah sebesar 0.atau sebesar 0 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 0 Rincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran 2020** | **Realisasi 2020** | **%** | **Realisasi 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Pengadaan Jalan |  |  |  |  |
| 2 | Pengadaan Jembatan |  |  |  |  |
| 3 | Pengadaan Bangunan Air Irigasi |  |  |  |  |
| 4 | Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA |  |  |  |  |
| 5 | Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku |  |  |  |  |
| 6 | Pengadaan Bangunan Air Kotor |  |  |  |  |
| 7 | Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih |  |  |  |  |
| 8 | Pengadaan Instalasi Air Kotor |  |  |  |  |
| 9 | Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik |  |  |  |  |
| 10 | Pengadaan Jaringan Air Minum |  |  |  |  |
| 11 | Pengadaan Jaringan Listrik |  |  |  |  |
| 12 | Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja aset tetap lainnya pada tahun 2020 terealisasi sebesar **Rp 15.079.350,00,** yang terdiri dari:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran 2020** | **Realisasi 2020** | **%** | **Realisasi 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Pengadaan Buku |  |  |  |  |
| 2 | Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan |  |  |  |  |
| 3 | Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan | 15.763.775,00 | 15.079,350,00 | 95,66 | 9.500.000,00 |
| 4 | Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya |  |  |  |  |
| 5 | Pengadaan Tanaman |  |  |  |  |
| 6 | Pengadaan Aset Tetap Renovasi |  |  |  |  |
| 7 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS |  |  |  |  |
| 8 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **15.763.775,00** | **15.079.350,00** | **95.66** | **9.500.00,00** |

**5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga**

Realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2020 adalah sebesar 0. atau sebesar 0 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 0. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

| **No** | **Uraian Bidang** | **Anggaran RKB** | **Realisasi** | **%** | **Sisa** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Penanganan Kesehatan** |  |  |  |  |
| **1** | **Dinas Kesehatan** |  |  |  |  |
| **2** | **Satuan Polisi Pamong Praja** |  |  |  |  |
| **3** | **Dinas Lingkungan Hidup** |  |  |  |  |
| **4** | **Rumah Sakit Umum** |  |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL (I)** |  |  |  |  |
| **II** | **Penanganan Dampak Ekonomi** |  |  |  |  |
| **1** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** |  |  |  |  |
| **2** | **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** |  |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL (II)** |  |  |  |  |
| **III** | **Penyediaan Jaring Pengaman Sosial** |  |  |  |  |
| **1** | **Dinas Sosial** |  |  |  |  |
|  | **SUB TOTAL (III)** |  |  |  |  |
|  | **TOTAL (I+II+III)** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

* 1. **Transfer**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2020**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |  | **0** |

Anggaran transfer tahun 2020 adalah sebesar 0., sedangkan realisasinya adalah sebesar 0 atau sebesar 0 dari anggaran yang ditetapkan. Transfer tersebut merupakan bagi hasil pendapatan Lainnya dan Bantuan Keuangan.

**5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya**

Realisasi transfer bagi hasil pendapatan lainnya tahun 2020 sebesar 0 atau 0 dari anggaran sebesar 0

**5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan**

Realisasi transfer bantuan keuangan tahun 2020 sebesar 0 atau 0. dari anggaran sebesar 0 yang terdiri dari :

Tabel . Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran 2020** | **Realisasi 2020** | **%** | **Realisasi 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1. | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya |  |  |  |  |
| 2. | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya**

Tahun 2020 tidak ada anggaran maupun realisasi untuk transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.

**5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**

Transfer Bantuan Keuangan lainnya terealisasi sebesar Rp.611.604.768. atau 100 % dari anggaran sebesar Rp.611.604.768 merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Rincian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran TA 2020 (Rp)** | **Realisasi TA 2020 (Rp)** | **%** | **Realisasi TA 2019 (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 131.286.048,00 | 131.286.048,00 | 100 | 131.286.048,00 |
| 2 | Partai Amanat Nasional | 68.264.256,00 | 68.264.256,00 | 100 | 68.264.256,00 |
| 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 89.153.952,00 | 89.153.952,00 | 100 | 89.153.952,00 |
| 4 | Partai Golongan Karya | 92.881.392,00 | 92.881.392,00 | 100 | 92.881.392,00 |
| 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 48.777.360,00 | 48.777.360,00 | 100 | 48.777.360,00 |
| 6 | Partai DEMOKRAT | 90.532.704,00 | 90.532.704,00 | 100 | 90.532.704,00 |
| 7 | Partai Keadilan Sejahtera | 37.819.488,00 | 37.819.488,00 | 100 | 37.819.488,00 |
| 8 | Partai Persatuan Pembangunan | 24.641.184,00 | 24.641.184,00 | 100 | 24.641.184,00 |
| 9 | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | 28.248.384,00 | 28.248.384,00 | 100 | 28.248.384,00 |
| **TOTAL** | | **611.604.768** | **611.604.768** | **100** | **611.604.768** |

* 1. **Surplus/Defisit LRA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2020**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2019**  **(Rp)** |
|  | **5.385.357.194,00** |  | **4.694.751.742,00** |  | **6.975.438,00** |

Surplus/ defisit LRA Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2020 sebesar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel . Surplus Defisit LRA Tahun 2020 dan 2019

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran TA 2020** | **Realisasi TA 2020** | **%** | **Realisasi TA 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Pendapatan |  |  |  |  |
| 2 | Belanja |  |  |  |  |
| 3 | Transfer |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

* 1. **Pembiayaan *Netto***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2020**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |  | **0** |

Pembiayaan *netto* adalah hasil dari selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2020 adalah sebesar 0 atau sebesar 0 % dari anggaran sebesar 0. dan naik sebesar 0 dari realisasi tahun lalu sebesar 0 Anggaran dan realisasi pembiayaan netto tahun 2020 berturut – turut sebesar 0 dan 0

**5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan**

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2020 sebesar 0 .atau sebesar 0 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Anggaran TA 2020** | **Realisasi TA 2020** | **%** | **Realisasi TA 2019** |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Lalu | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
| 2. | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
| **TOTAL** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

* 1. **Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anggaran TA 2020**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2020**  **(Rp)** |  | **Realisasi TA 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |  | **0** |

Sisa lebih pembiayaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tahun anggaran 2020 sebesar 0 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel . Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

| **Uraian** | **Anggaran TA 2020** | **Realisasi TA 2020** | **%** | **Realisasi TA 2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| Pendapatan | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
| Belanja | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
| Transfer | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
| **Surplus (Defisit)** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
| Pembiayaan Netto | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |
| **SILPA** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2020 sebesar 0 . tersebut terdiri dari:

Tabel . Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Tahun 2020** | **Tahun 2019** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| Kas Di Kas Daerah | **NIHIL** | **NIHIL** |
| Kas Di Bendahara Penerimaan | **NIHIL** | **NIHIL** |
| Kas Bendahara Pengeluaran | **NIHIL** | **NIHIL** |
| Kas Di BLUD | **NIHIL** | **NIHIL** |
| Kas DI Bendahara BOS | **NIHIL** | **NIHIL** |
| Utang Pajak | **NIHIL** | **NIHIL** |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya | **NIHIL** | **NIHIL** |
| **SILPA** | **NIHIL** | **NIHIL** |

1. **NERACA**
2. **Aset Lancar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **183.500** |  | **220.000** |

Aset lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.183.500. dan 220.000. terdiri dari :

Tabel . Rincian Aset Lancar

| **No** | **Uraian** | **31 Desember 2020** | **31 Desember 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1. | Kas di Kas Daerah |  |  |
| 2. | Kas di Bendahara Pengeluaran |  |  |
| 3. | Kas di Bendahara Penerimaan |  |  |
| 4. | Kas di BLUD |  |  |
| 5. | Kas di Bendahara BOS |  |  |
| 6. | Piutang Pendapatan |  |  |
| 7. | Piutang Lainnya |  |  |
| 8. | Penyisihan Piutang |  |  |
| 9. | Belanja Dibayar Dimuka |  |  |
| 10. | Persediaan | 183.000 | 220.000 |
| **Jumlah** | | **183.000** | **220.000** |

Adapun penjelasan aset lancar Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

##### 5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0 merupakan saldo pada Rekening Giro Kas Umum Daerah di Bank Jatim dengan nomor rekening 0.

##### 5.3.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Rincian Aset Lancar

| **No** | **Uraian** | **31 Desember 2020** | **31 Desember 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1. | RSU Dr. wahidin Sudiro Husodo |  |  |
| 2. | Dinas Perhubungan |  |  |
| 3. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### 5.3.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0,00** |  | **0,00** |

Terdapat penerimaan kas dari Belanja Tidak Terduga kepada bendahara pengeluaran untuk penanganan COVID-19 sebesar 0 yang digunakan untuk:

Tabel 61. Rincian Belanja Tidak Terduga (COVID-19)

| **No** | **Uraian** | **31 Desember 2020** | **31 Desember 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1. | Belanja……………. |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

Pengakuan atas belanja dimaksud berada di SKPKD sehingga saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00

##### 5.3.1.4 Kas di BLUD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar 0 dan 0 yang terdiri dari:

Tabel . Rincian Kas di BLUD

| **No** | **Uraian** | **31 Desember 2020** | **31 Desember 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Dinas Kesehatan |  |  |
| 2 | RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

Adapun penjelasan saldo kas di BLUD pada masing-masing entitas adalah sebagai berikut :

###### 5.3.1.4.1 Kas di BLUD Dinas Kesehatan

Saldo kas di BLUD Dinas Kesehatan merupakan Kas pada BLUD Puskesmas di wilayah Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0. dan 0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Rincian Kas di BLUD Dinas Kesehatan (Puskesmas)

| **No** | **Uraian** | **31 Desember 2020** | **31 Desember 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Puskesmas Mentikan (Bank Jatim No.Rek 0161025909) |  |  |
| 2 | Puskesmas Blooto (Bank Jatim No.Rek 0161085933) |  |  |
| 3 | Puskesmas Kedundung (Bank Jatim No.Rek 0161025917) |  |  |
| 4 | Puskesmas Gedongan (Bank Jatim No.Rek 0161025925) |  |  |
| 5 | Puskesmas Wates (Bank Jatim No.Rek 0161025295) |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

###### 5.3.1.4.2 Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Dr.Wahidin Sudiro Husoso per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0. dan 0 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . Rincian Kas di BLUD RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **31 Desember 2020** | **31 Desember 2019** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Kas di Rekening Bank Jatim No. Rek. 01610011231 |  |  |
| 2 | Kas di Rekening Bank BNI No. Rek. 3221949999 |  |  |
|  | dst |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### 5.3.1.5 Kas di Bendahara BOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Akun kas di bendahara BOS adalah posisi dana yang ada pada Unit Pelaksana Teknis, yang merupakan penerimaan langsung dan dibelanjakan sesuai dengan rencana alokasi pembiayaan kegiatan. Saldo Kas di Bendahara BOS pada tahun 2020 dan 2019 sebesar 0. dan 0. merupakan posisi kas yang ada pada unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dengan rincian sebesar 0 terdapat di rekening bank masing-masing sekolah. Rincian kas bank BOSNAS adalah sebagai berikut:

Tabel . Rincian Kas di Bendahara BOS

| **No** | **Nama Sekolah** | **No Rekening** | **Jumlah (Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDN PULOREJO 1 | 0162243012 |  |
| 2 | SDN PULOREJO 2 | 0162242971 |  |
| 3 | dst |  |  |
| **Total** | | | **NIHIL** |

Tabel . Rincian Mutasi Kas Tahun 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jenis** | **Saldo** | **Penambahan Tahun 2020** | **Pengurangan Tahun 2020** | **Saldo** |
| **31 Des 2019** | **31 Des 2020** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| Kas di Kas Daerah |  |  |  |  |
| Kas di Bendaharan Penerimaan |  |  |  |  |
| Kas di Bendahara Pengeluaran |  |  |  |  |
| Kas di BLUD |  |  |  |  |
| Kas di Bendahara BOS |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### 5.3.1.6 Kas dari dana NON APBD (Khusus Satpol)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Pada tahun anggaran 2020 terdapat penerimaan bantuan berupa uang dari pihak ketiga (Non APBD) yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 61. Rincian Penerimaan Bantuan Berupa Uang dari Pihak Ketiga (COVID-19)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bulan** | **Pemberi Hibah** | **Jumlah** |
| **(Rp)** |
| 1. | Mei | ………………… |  |
|  |  | ………………… |  |
| 2. | Juni | ………………… |  |
|  |  | ……………….. |  |
| 3. | dst | ………………….. |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

Tabel 61. Rincian Pengeluaran Bantuan Berupa Uang dari Pihak Ketiga (COVID-19)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bulan** | **Jenis Belanja** | **Jumlah** |
| **(Rp)** |
| 1. | Mei | ………………… |  |
|  |  | ………………… |  |
| 2. | Juni | ………………… |  |
|  |  | ……………….. |  |
| 3. | dst | ………………….. |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### Per 31 Desember 2020 sisa dana tersebut telah disetorkan ke Kas Umum Daerah Kota Mojokerto sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020. Sehingga kas dari dana Non APBD sebesar Rp0,00

##### 5.3.1.7 Piutang Pendapatan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . Rincian Piutang Pendapatan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **31 Desember 2020** | **31 Desember 2019** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | Piutang Pajak | **NIHIL** | **NIHIL** |
| 2 | Piutang Retribusi | **NIHIL** | **NIHIL** |
| 3 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | **NIHIL** | **NIHIL** |
| 4 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | **NIHIL** | **NIHIL** |
| 5 | Piutang Transfer Pemerintah Daerah Provinsi | **NIHIL** | **NIHIL** |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

Adapun penjelasan saldo piutang pendapatan pada tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut :

###### 5.3.1.6.1 Piutang Pajak

Saldo Piutang pajak per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0. dan 0 dengan rincian dan mutasi tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel . Rincian Piutang Pajak

| **Uraian** | **31 Des 2019** | **Penambahan Piutang** | **Pelunasan Piutang** | **31 Des 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| Pajak Restoran |  |  |  |  |
| Pajak Hiburan |  |  |  |  |
| Pajak Reklame |  |  |  |  |
| Pajak Parkir |  |  |  |  |
| Pajak Air Tanah |  |  |  |  |
| Pajak Bumi dan Bangunan |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

###### 5.3.1.6.2 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0. dan 0. dengan rincian dan mutasi tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel . Rincian Piutang Retribusi

| **Uraian** | **31 Des 2019** | **Penambahan Piutang** | **Pelunasan Piutang** | **31 Des 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| Retribusi Jasa Umum |  |  |  |  |
| Retribusi Jasa Usaha |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

###### 5.3.1.6.3 Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2020 Sebesar 0 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel . Rincian dan Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **31 Des 2019** | **Penambahan Piutang** | **Pelunasan Piutang** | **31 Des 2020** |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan |  |  |  |  |
| Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Dari tabel mutasi Piutang Dana Bagi Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

###### 5.3.1.6.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang BLUD

Piutang BLUD merupakan piutang pada RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang sah terdiri dari:

Tabel . Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 | Pasien Umum |  |  |
| 2 | Pasien BPJS Kesehatan |  |  |
| 3 | Pasien Jamkes Prop |  |  |
| 4 | Pasien Jasa Raharja |  |  |
| 5 | Pasien Inhealth |  |  |
| 6 | Pasien PT. Ajinomoto |  |  |
| 7 | Pasien BPJS Tenaga Kerja |  |  |
| **Total** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

Piutang Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Piutang hasil eksekusi atas jaminan merupakan piutang merupakan piutang atas jaminan pelaksanaan pekerjaan putus kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Rincian Piutang Hasil Eksekusi Atas Jaminan

| **No** | **SKPD** | **Jumlah** |
| --- | --- | --- |
| **(Rp)** |
| 1. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
| 2. | Kelurahan Prajurit Kulon |  |
| 3. | Kelurahan Mentikan |  |
| 4. | Kelurahan Magersari |  |
| 5. | Kelurahan Gunung Gedangan |  |
| **Total** | | **NIHIL** |

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sebesar 0. merupakan piutang Bangun Guna Serah CV.Sari Alam sesuai dengan surat keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/156/417.111/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang pemutusan kerjasama. Adapun rincian dari piutang tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel . Rincian Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah

| **No** | **Uraian** | **31 Desember 2020** |
| --- | --- | --- |
| **(Rp)** |
| 1 | Kekurangan Pembayaran Pemanfaatan Fasilitas ditambah Denda |  |
| 2 | Pajak Parkir |  |
| 3 | Pajak Bumi dan Bangunan |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** |

##### 5.3.1.7 Piutang Lainnya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0. dengan rincian dan mutasi tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel . Rincian dan Mutasi Piutang Lainnya

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **31 Des 2019** | **Penambahan Piutang** | **Pelunasan Piutang** | **31 Des 2020** |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah |  |  |  |  |
| Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa |  |  |  |  |
| Piutang Lainnya |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Dari tabel mutasi Piutang Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

###### 5.3.1.7.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0., terdiri dari :

Tabel . Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 | Tri Sunu Yunianto – CV ZC |  |  |
| 2 | Didik Badrianto |  |  |
| 3 | Candra Iffan Hidayanto – CV MM |  |  |
| 4 | Kurang Volume atas pekerjaan tahun 2020 |  |  |
| **Total** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

###### 5.3.1.7.2 Piutang Lain-Lain

Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0., terdiri dari :

Tabel . Rincian Piutang Lain-lain

| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 | Piutang Dana Bergulir |  |  |
| 2 | Tagihan Penjualan Angsuran Kios Pasar |  |  |
| 3 | Piutang tunggakan wajib pajak/Pihak ketiga lainnya |  |  |
| **Total** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### 5.3.1.8 Penyisihan Piutang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0. dan 0. terdiri dari :

Tabel . Rincian Penyisihan Piutang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 | Penyisihan Piutang Pendapatan |  |  |
| 2 | Penyisihan Piutang Lainnya |  |  |
| **Total** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

Adapun rincian lebih lanjut dari tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut:

###### 5.3.1.8.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0. dan 0. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 | Penyisihan Piutang piutang pajak daerah |  |  |
| 2 | Penyisihan Piutang Retribusi |  |  |
| 3 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah |  |  |
| **Total** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

###### 5.3.1.8.2 Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Rincian Penyisihan Piutang Lainnya

| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 | Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian |  |  |
| 2 | Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Kios Pasar |  |  |
| 3 | Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir |  |  |
| 4 | Penyisihan Tunggakan Pihak Ketiga |  |  |
| **Total** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### 5.3.1.9 Beban Dibayar Dimuka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Beban dibayar dimuka adalah beban-beban yang belum merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun Pemerintah Daerah sudah membayarnya terlebih dahulu. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban Pemerintah Daerah untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka.

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar 0 dan 0 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . Rincian Beban Dibayar di Muka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **31 Des 2019** | **Penambahan Piutang** | **Pelunasan Piutang** | **31 Des 2020** |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| Premi Asuransi Pasar |  |  |  |  |
| Premi Asuransi Kesehatan |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### 5.3.1.10 Persediaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **183.500** |  | **220.000** |

Saldo persediaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar **Rp. 183.500** dan **Rp.220.000** dengan rinciansebagai berikut:

Tabel . Rincian Persediaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 | Persediaan Bahan Pakai Habis | 183.500.00 | 220.000,00 |
| 2 | Persediaan Bahan/Material |  |  |
| 3 | Persediaan Barang Lainnya |  |  |
|  | **JUMLAH** | **183.500.00** | **220.000,00** |

###### Dari nilai persediaan sebesar Rp 0 Terdapat persediaan yang berasal dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 0 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52. Rincian Persediaan dari Belanja Tidak Terduga

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 | Persediaan Bahan Pakai Habis | **NIHIL** | **NIHIL** |
| 2 | Persediaan Bahan/Material | **NIHIL** | **NIHIL** |
| 3 | Persediaan Barang Lainnya | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  | **JUMLAH** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Pada TA 2020 terdapat persediaan dari bantuan pihak ketiga yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Sampai dengan per 31 Desember 2020 persediaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 53. Rincian Persediaan dari Pihak Ketiga

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Jumlah** |
| **Rp** |
| 1 | **NIHIL** | **NIHIL** |
| 2 | **NIHIL** | **NIHIL** |
| 3 | **NIHIL** | **NIHIL** |
|  | **Total** | **0** |

###### 5.3.1.10.1 Persediaan Bahan Pakai Habis

Saldo Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 183.500. dan 220.000 terdiri dari :

Tabel . Rician Persediaan Bahan Pakai Habis

| **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| --- | --- | --- |
| **Rp** | **Rp** |
| Alat Tulis Kantor | 96.000 | 100.000 |
| Alat Listrik dan Elektronik |  |  |
| Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya |  |  |
| Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih |  |  |
| Kertas/ StopMap/ AmplopKop | 87.500 | 120.000 |
| Karcis dan Stiker |  |  |
| Blangko |  |  |
| Buku Uji Kir Kendaraan |  |  |
| Plat Uji Kir Kendaraan |  |  |
| Suku Cadang Sarana Mobilitas Darat |  |  |
| **JUMLAH** | **183.500** | **220.000** |

###### 5.3.1.10.2 Persediaan Bahan Material

Saldo Persediaan Bahan/Material per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 0.dan 0 terdiri dari :

Tabel . Rincian Persediaan Bahan Material

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| **Rp** | **Rp** |
| Bahan baku bangunan |  |  |
| Bahan Obat-obatan |  |  |
| Bahan Kimia |  |  |
| Bahan Makanan Pokok |  |  |
| ASPAL |  |  |
| Pakan Ternak |  |  |
| Alat-alat Kesehatan |  |  |
| **Jumlah** | **NIHIL** | **NIHIL** |

###### 5.3.1.10.3 Persediaan Barang Lainnya

Persediaan barang lainnya yang tercatat pada neraca Tahun Anggaran 2020 merupakan 0

1. **Investasi Jangka Panjang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0. dan 0. merupakan Investasi Permanen.

##### 5.3.2.1 Investasi Permanen

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0. dan 0 merupakan nilai buku penyertaan modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Badan Usaha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Rincian Penyertaan Modal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **31-Des-19** | **31-Des-18** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | PDAM Maja Tirta | **NIHIL** | **NIHIL** |
| 2 | PT. Bank Jatim | **NIHIL** | **NIHIL** |
| 3 | PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | **NIHIL** | **NIHIL** |
| **JUMLAH** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

Uraian lebih lanjut tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. **Aset Tetap**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **3.454.375.147,00** |  | **3.600.173.175,00** |

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 3.454.375.147,00 dan Rp.3.600.173.175,00 terdiri atas :

Tabel 57. Rincian Aset Tetap

| **No** | **Uraian** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tanah | 222.750.000,00 | 222.750.000,00 |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 1.578.267.383,00 | 1.552.767.383,00 |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 3.060.494.965,00 | 3.060.494.965 |
| 4. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 107.064.590,00 | 91.985.240,00 |
| 6. | Kontruksi Dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Akumulasi Penyusutan | (1.514.201.791,,00) | (1.327.824.413,00) |
|  | **Nilai Buku** | **3.454.375.147,00** | **3.600.173.175,00** |

###### Dari nilai aset tetap sebesar Rp 0 Terdapat aset tetap yang berasal dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 0 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58. Rincian Persediaan dari Belanja Tidak Terduga

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **JUMLAH** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Nilai aset tetap yang disajikan tersebut di atas sesuai dengan entry data dan klasifikasi aset pada Sistem Informasi Barang Daerah (Simda BMD).

Adapun penjelasan aset tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto per 31 Desember 2020 dan 2020 adalah sebagai berikut :

##### 5.3.3.1 Tanah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
|  | **222.750.000** |  | **222.750.000** |

Saldo Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.222.750.000 dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.222.750.000 dari tahun 2020 sebesar 0. dengan sebagai berikut:

Tabel 59. Rincian Aset Tetap Tanah

| **No** | **Uraian** | **Saldo Awal Per 31-12-2020** | **Realisasi Belanja Modal 2020** | **Penyesuaian/ Koreksi 2020** | | **Saldo Akhir Per 31-12-2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Tambah** | **Kurang** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(f)** | **(g)** | **(h) = c + f - g** |
| 1 | Tanah Persil | 222.750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 222.750.000 |
| 2 | Tanah Non Persil |  |  |  |  |  |
| 3 | Lapangan |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **222.750.000,00** | **0** | **0** | **0** | **222.750.000** |

Perhitungan saldo tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saldo per 31 Desember 2020 |  |  | Rp | 0,00 |
| Penambahan Tahun 2020 : |  |  |  |  |
| a.   Realisasi Belanja Modal | Rp | 0,00 |  |  |
| b.   Reklasifikasi aset | Rp | 0,00 |  |  |
| c.   Mutasi Masuk antar SKPD | Rp | 0,00 |  |  |
| d.   Koreksi | Rp | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Rp | 0,00 |
| Jumlah |  |  | Rp | 0,00 |
| Pengurangan Tahun 2020 : |  |  |  |  |
| a.   Penghapusan aset | Rp | 0,00 |  |  |
| b. Hibah | Rp | 0,00 |  |  |
| c.   Mutasi Keluar antar SKPD | Rp | 0,00 |  |  |
| d. Reklasifikasi Ke Aset Lain2 | Rp | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Saldo per 31 Desember 2020** |  |  | **Rp** | **0,00** |

Penjelasan atas perhitungan aset tanah pada Tahun 2020 sebesar Rp 0 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar 0,00 merupakan pengadaan tanah Untuk 0;
2. Reklasifikasi aset sebesar 0. berasal dari reklasifikasi Bangunan Gedung Kantor senilai 0;
3. Mutasi masuk antar SKPD sebesar 0 merupakan perpindahan aset tanah antar SKPD di Lingkungan Kota Mojokerto selama Tahun 2020;
4. Koreksi aset tetap tanah sebesar 0 berasal dari koreksi

Adapun penjelasan pengurangan aset tetap tanah pada tahun 2020 sebesar 0 adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan aset tetap berupa tanah kosong sebesar 0. pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset (SKPKD) dikarenakan pemisahan setifikat tanah;
2. Hibah ke Polres Kota Mojokerto sebesar 0 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset (SKPKD);
3. Mutasi keluar antar SKPD sebesar 0 merupakan perpindahan aset tanah antar SKPD di Lingkungan Kota Mojokerto selama Tahun 2020;
4. Reklasifikasi aset ke Aset Pinjam Pakai sebesar 0 pada pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset (SKPKD).

Adapun saldo aset tetap berupa tanah berdasarkan OPD per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 60. Rincian Aset Tetap Tanah per OPD

| **No** | **OPD** | **Saldo Awal Per 31-12-2020** | **Realisasi Belanja Modal 2020** | **Penyesuaian/ Koreksi 2020** | | **Saldo Akhir Per 31-12-2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Tambah** | **Kurang** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(f)** | **(g)** | **(h) = c + f - g** |
| 1 | Dinas Pendidikan |  |  | - | - | - |
| 2 | Dinas Kesehatan |  |  | - | - | - |
| 3 | RSU Dr. Wahidin Sudiro Hudoso (SKPD) |  |  | - | - | - |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |  |  | - | - | - |
| 6 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |  |  | - | - | - |
| 7 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 222.750.000 | - | - | - | 222.750.000- |
| 8 | Dinas Sosial |  |  | - | - | - |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |  |  | - | - | - |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |  |  | - | - | - |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup |  |  | - | - | - |
| 12 | Dinas Perhubungan |  |  | - | - | - |
| 13 | Dinas Komunikasi dan Informatika |  |  | - | - | - |
| 14 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenagan Kerja |  |  | - | - | - |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |  | - | - | - |
| 16 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata |  |  | - | - | - |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |  |  | - | - | - |
| 18 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |  |  | - | - | - |
| 19 | Bag. Pemerintahan |  |  | - | - | - |
| 20 | Bag. Umum |  |  | - | - | - |
| 21 | Sekretariat Dewan |  |  | - | - | - |
| 22 | Kecamatan Prajurit Kulon |  |  | - | - | - |
| 23 | Kecamatan Magersari |  |  | - | - | - |
| 24 | Kecamatan Kranggan |  |  | - | - | - |
| 25 | Inspektorat |  |  | - | - | - |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan |  |  | - | - | - |
| 27 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPD) |  |  | - | - | - |
| 28 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPKD) |  |  | - | - | - |
| 29 | Badan Kepegawaian |  |  | - | - | - |
| 30 | Badan Penelitian Dan Pengembangan |  |  | - | - | - |
| **JUMLAH** | | **222.750.000** |  | **0** | **0** | **222.750.000** |

Pada Pemerintah Kota Mojokerto terdapat aset tanah yang masih dalam proses hukum dengan pihak ketiga antara lain :

* Tanah dan Bangunan SDN Kranggan 1 yang terletak di Pekayon Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan dimana Aset tanah ini belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Mojokerto seluas 2.548 m2 dan tahun perolehan 1982
* Tanah aset yang direncanakan untuk lokasi pembangunan kantor Kecamatan Kranggan, KORAMIL, POLSEK dan KUA Kranggan yang terletak di Kelurahan Kranggan dimana Aset tanah ini sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Mojokerto seluas 25.028 m2 dan tahun perolehan 1972
* Tanah Di Jalan PB Sudirman No. 40 yang saat ini dipakai Kantor Kecamatan Kranggan seluas 1.035 m2 yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Mojokerto
* Tanah Di Jalan Karyawan No. 4 yang saat ini dipakai UPT SMP Negeri 7 seluas 2.288 m2 yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Mojokerto
* Tanah Di Jalan KH. A Dahlan No. 6 yang saat ini dipakai Taman Bacaan Tantular seluas 1.612 m2 yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Mojokerto

##### 5.3.3.3 Peralatan dan Mesin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **1.578.267.383,00** |  | **1.552.767.383** |

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.578.267.383,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.500.000,00 dari tahun 2019 sebesar 98 % dengan sebagai berikut:

**Tabel 61. Rincian Peralatan dan Mesin**

| **No** | **Uraian** | **Permendagri 64/2013** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo Awal** | **Realisasi** | **Penyesuaian /**  **Koreksi 2020** | | **Saldo Akhir** |
| **Per 31-12-2019** | **Belanja Modal 2020** | **Per 31-12-2020** |
| **Tambah** | **Kurang** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(f)** | **(g)** | **(h) = c + f - g** |
| 1 | Alat-Alat Besar Darat |  |  |  |  |  |
| 2 | Alat-alat Bantu |  |  |  |  |  |
| 3 | Alat Angkutan Darat Bermotor |  |  |  |  |  |
| 4 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor |  |  |  |  |  |
| 5 | Alat Angkut Apung Bermotor |  |  |  |  |  |
| 6 | Alat Bengkel Bermesin |  |  |  |  |  |
| 7 | Alat Bengkel Tak Bermesin |  |  |  |  |  |
| 8 | Alat Ukur |  |  |  |  |  |
| 9 | Alat Pengolahan |  |  |  |  |  |
| 10 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan |  |  |  |  |  |
| 11 | Alat Kantor |  |  |  |  |  |
| 12 | Alat Rumah Tangga |  |  |  |  |  |
| 13 | Komputer |  |  |  |  |  |
| 14 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 1.552.767.383,00 | 25.000.000,00 | 30.608.875,00 | 5.108.875,00 | 1.578.267.383,00 |
| 15 | Alat Studio |  |  |  |  |  |
| 16 | Alat Komunikasi |  |  |  |  |  |
| 17 | Peralatan Pemancar |  |  |  |  |  |
| 18 | Alat Kedokteran |  |  |  |  |  |
| 19 | Alat Kesehatan |  |  |  |  |  |
| 20 | Unit-Unit Laboratorium |  |  |  |  |  |
| 21 | Alat Peraga/Praktek Sekolah |  |  |  |  |  |
| 22 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir |  |  |  |  |  |
| 23 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika |  |  |  |  |  |
| 24 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan |  |  |  |  |  |
| 25 | Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) |  |  |  |  |  |
| 26 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |
| 27 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika |  |  |  |  |  |
| 28 | Senjata Api |  |  |  |  |  |
| 29 | Persenjataan Non Senjata Api |  |  |  |  |  |
| 30 | Alat Keamanan dan Perlindungan |  |  |  |  |  |
| 31 | Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Isntrumentasi |  |  |  |  |  |
| 32 | Komputer Unit |  |  |  |  |  |
| 33 | Peralatan Komputer |  |  |  |  |  |
| 34 | Alat SAR |  |  |  |  |  |
| 35 | Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat |  |  |  |  |  |
| 36 | Peralatan Olah Raga |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **1.552.767.383,00** | **25.500.000** | **30.608.875,00** | **5.108.875,00** | **1.578.267.383** |

Perhitungan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saldo per 31 Desember 2020 |  |  | **Rp** | **1.552.767.383,00** |
| Penambahan Tahun 2020 : |  |  |  |  |
| a.   Realisasi Belanja Modal | Rp | 25.500.000,00 |  |  |
| b.   Reklasifikasi aset | Rp | ,00 |  |  |
| c.   Mutasi Masuk | Rp | 0,00 |  |  |
| d.   Realisasi Dari Barjas | Rp | 0,00 |  |  |
| e. Hibah | Rp | 0,00 |  |  |
| f. Koreksi | Rp | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Rp** | **25.500.000,00** |
| Jumlah |  |  | **Rp** | **1.578.267.383,00** |
| Pengurangan Tahun 2020 : |  |  |  |  |
| a.   Reklasifikasi aset | Rp | 0,00 |  |  |
| b.   Extracomptable | Rp | 0,00 |  |  |
| c.   Koreksi | Rp | 0,00 |  |  |
| d.   Penghapusan | Rp | 0,00 |  |  |
| e.   Mutasi keluar | Rp | 0,00 |  |  |
| f. Barang non aset | Rp | 0,00 |  |  |
| g. Reklasifikasi ke aset lain2 | Rp | 0,00 |  |  |
| h. Temuan kurang volume | Rp | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Rp** | **0** |
| **Saldo per 31 Desember 2020** |  |  | **Rp** | **1.578.267.383,00** |
|  |  |  |  |  |

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 25.500.000,00. antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

* 1. Realisasi Belanja Modal tahun 2020 terdiri dari belanja modal SKPD sebesar 25.500.000,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 62. Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun 2020**

| **No.** | **Uraian** | **Nilai** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dinas Pendidikan |  |
| 2 | Dinas Kesehatan |  |
| 3 | RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo |  |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang |  |
| 5 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |  |
| 6 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 25.500.000.00 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja |  |
| 8 | Dinas Sosial |  |
| 9 | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |  |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup |  |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |  |
| 13 | Dinas Perhubungan |  |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika |  |
| 15 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja |  |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
| 17 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |  |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |  |
| 19 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |  |
| 20 | Bagian Pembangunan |  |
| 21 | Bagian Umum |  |
| 22 | Sekretariar DPRD |  |
| 23 | Kecamatan Prajurit Kulon |  |
| 24 | Kecamatan Kranggan |  |
| 25 | Inspektorat |  |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan |  |
| 27 | Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPD) |  |
| 28 | Badan Kepegawaian |  |
| 29 | Badan Penelitian dan Pengembangan |  |
|  | **JUMLAH** | **25.500.000,00** |

* 1. Reklasifikasi dari Gedung Bangunan, Aset Tetap Lainnya dan Kontruksi Dalam Pembangunan sebesar 0
  2. Mutasi Masuk Antar SKPD Sebesar 0
  3. Realisasi Peralatan dan Mesin dari belanja barang dan Jasa Sebesar 0

**Tabel 63. Rincian Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa**

| **No.** | **Uraian** | **Nilai** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dinas Kesehatan |  |
| 2 | Satuan Polisi Pamong Praja |  |
| 3 | Sekretariat Daerah |  |
| 4 | Kecamatan Kranggan |  |
|  | **JUMLAH** | **NIHIL** |

* 1. Hibah Peralatan dan Mesin Dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lainnya sebesar 0
  2. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Saldo Awal Pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Dana RW Tahun 2019 sebesar 0 pada Kecamatan Magersari

Sedangkan Penjelasan atas rincian nilai pengurangan aset tetap peralatan dan mesin 0. antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin tahun 2020 ke Aset Tetap Lainnya, Jalan Irigasi Jaringan sebesar 0
2. Pengurangan Aset tetap peralatan dan mesin ke barang ekstracompatable sebesar 0.

**Tabel 64. Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ektracompatable**

| **No.** | **Uraian** | **Nilai** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dinas Pendidikan |  |
| 2 | Dinas Kesehatan |  |
| 3 | RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo (BLUD) |  |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang |  |
| 5 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |  |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja |  |
| 7 | Dinas Sosial |  |
| 8 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |  |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup |  |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |  |
| 11 | Dinas Perhubungan |  |
| 12 | Dinas Komunikasi dan Informatika |  |
| 13 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja |  |
| 14 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |  |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |  |
| 16 | Sekretariat Daerah |  |
| 17 | Kecamatan Magersari |  |
| 18 | Kecamatan Kranggan |  |
| 19 | Badan Perencanaan Pembangunan |  |
| 20 | Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPD) |  |
| 21 | Badan Kepegawaian |  |
|  | **JUMLAH** | **NIHIL** |

1. Pengurangan Peralatan dan Mesin dikarenakan Koreksi saldo awal dimana di tahun 2019 diakui sebagai aset tetap sedangkan peralatan dan mesin tersebut seharusnya masuk ke barang extrakompatible sebesar 0
2. Pengurangan Peralatan dan Mesin dikarenakan penghapusan sebesar 0. pada Dinas Kesehatan sebesar 0 dan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 0. dan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar 0
3. Mutasi Keluar Antar SKPD sebesar .0
4. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Dikarenakan Barang Bukan Aset sebesar 0.

**Tabel 65. Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin dari Barang Bukan Aset**

| **No.** | **Uraian** | **Nilai** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dinas Kesehatan |  |
| 2 | Dinas Perhubungan |  |
| 3 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja |  |
| 4 | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |
|  | **JUMLAH** | **NIHIL** |

1. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Dikarenakan Reklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai sebesar 0. pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPKD) sebesar 0. dan pada Sekretariat Daerah – Bagian Umum sebesar 0.
2. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Karena Temuan BPK karena tidak sesuai kontrak pada pekerjaan Pengadaan AC dan Genset Gedung GMSC sebesar 0. pada Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang

Adapun saldo aset tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan OPD per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 66. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD

| **No** | **OPD** | **Saldo Awal** | **Realisasi** | **Penyesuaian/ Koreksi 2020** | | **Saldo Akhir** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Per 31-12-2020** | **Belanja Modal 2020** | **Per 31-12-2020** |
| **Tambah** | **Kurang** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(f)** | **(g)** | **(h) = c + f - g** |
| 1 | Dinas Pendidikan |  |  |  |  |  |
| 2 | Dinas Kesehatan |  |  |  |  |  |
| 3 | RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo (SKPD) |  |  |  |  |  |
| 4 | RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo (BLUD) |  |  |  |  |  |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |  |  |  |  |  |
| 6 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |  |  |  |  |  |
| 7 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.552.767.383,00 | 25.500.000,00 |  |  | 1.578.267.383,00 |
| 8 | Satuan Polisi Pamong Praja |  |  |  |  |  |
| 9 | Dinas Sosial |  |  |  |  |  |
| 10 | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |  |  |  |  |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |  |  |  |  |  |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |  |  |  |  |  |
| 14 | Dinas Perhubungan |  |  |  |  |  |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika |  |  |  |  |  |
| 16 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |  |  |  |  |
| 18 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |  |  |  |  |  |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |  |  |  |  |  |
| 20 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |  |  |  |  |  |
| 21 | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |
| 22 | Sekretariat DPRD |  |  |  |  |  |
| 23 | Kecamatan Prajurit Kulon |  |  |  |  |  |
| 24 | Kecamatan Magersari |  |  |  |  |  |
| 25 | Kecamatan Kranggan |  |  |  |  |  |
| 26 | Inspektorat |  |  |  |  |  |
| 27 | Badan Perencanaan Pembangunan |  |  |  |  |  |
| 28 | Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPD) |  |  |  |  |  |
| 29 | Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPKD) |  |  |  |  |  |
| 30 | Badan Kepegawaian |  |  |  |  |  |
| 31 | Badan Penelitian dan Pengembangan |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **1.552.767.383,00** | **25.500.000** |  |  | **1.578.267.383,00** |

##### 5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
|  | **3.060.494.965** |  | **3.060.494.965** |

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 dari tahun 2020 sebesar 0 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 67. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

| **No** | **Uraian** | **Saldo Awal Per**  **31-12-2019** | **Realisasi**  **Belanja Modal 2020** | **Penyesuaian/**  **Koreksi 2020** | | **Saldo Akhir Per**  **31-12-2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tambah** | **Kurang** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(f)** | **(g)** | **(h) = c + f - g** |
| 1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 3.060.494.965,00 | 0 | 0 | 0 | 3.060.494.965,00 |
| 2 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal |  |  |  |  |  |
| 3 | Bangunan Bersejarah |  |  |  |  |  |
| 4 | Tugu Peringatan |  |  |  |  |  |
| 5 | Monumen/Bangunan Bersejarah |  |  |  |  |  |
| 6 | Tugu Peringatan |  |  |  |  |  |
| 7 | Tugu Titik Kontrol/Pasti |  |  |  |  |  |
| 8 | Rambu - Rambu |  |  |  |  |  |
| 9 | Candi/Tugu Peringatan/Prasasti |  |  |  |  |  |
| 10 | Bangunan Menara Perambuan |  |  |  |  |  |
| 11 | Tugu/Tanda Batas |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **3.060.494.965,00** | **0** | **0** | **0** | **3.060.494.965,00** |

Perhitungan saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saldo per 31 Desember 2020 |  |  | **Rp** | **3.060.494.965,00** |
| Penambahan Tahun 2020 : |  |  |  |  |
| a.   Realisasi Belanja Modal | Rp | 0 |  |  |
| b.   Reklasifikasi aset | Rp | 0 |  |  |
| c.   Mutasi Masuk | Rp | 0 |  |  |
| d. Hibah | Rp | 0 |  |  |
| e. Realisasi Dari Belanja Barjas | Rp | 0 |  |  |
| f. Koreksi | Rp | 0 |  |  |
|  |  |  | **Rp** | **0** |
| Jumlah |  |  | **Rp** | **3.060.494.965,00** |
| Pengurangan Tahun 2020 : |  |  |  |  |
| a.   Reklasifikasi aset | Rp | 0 |  |  |
| b.   Extracomptable | Rp | 0 |  |  |
| c.   Barang non aset | Rp | 0 |  |  |
| d.   Penghapusan | Rp | 0 |  |  |
| e.   Mutasi Keluar | Rp | 0 |  |  |
| f. Hibah | Rp | 0 |  |  |
| g. Reklasifikasi ke Aset Lain2 | Rp | 0 |  |  |
| h. Temuan Kekurangan Volume | Rp | 0 |  |  |
|  |  |  | **Rp** | **0** |
| **Saldo per 31 Desember 2020** |  |  | **Rp** | **3.060.494.965,00** |
|  |  |  |  |  |

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar 0 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal tahun 2020 terdiri dari belanja modal SKPD sebesar 0., dengan rincian per SKPD sebagai berikut.

**Tabel 68. Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Tahun 2020**

| **No.** | **Uraian** | **Nilai** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dinas Pendidikan |  |
| 2 | Dinas Kesehatan |  |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |  |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |  |
| 5 | Satuan Polisi Pamong Praja |  |
| 6 | Dinas Sosial |  |
| 7 | Dinas PPAPPKB |  |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup |  |
| 9 | Dinas Perhubungan |  |
| 10 | Dinas Komunikasi dan Informatika |  |
| 11 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja |  |
| 12 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |  |
| 13 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |  |
| 14 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |  |
| 15 | Kecamatan Prajurit Kulon |  |
| 16 | Kecamatan Magersari |  |
| 17 | Kecamatan Kranggan |  |
| 18 | Inspektorat |  |
| 19 | Badan Kepegawaian |  |
| 20 | Badan Penelitian dan Pengembangan |  |
|  | **JUMLAH** | **NIHIL** |

1. Reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan Dari Peralatan Mesin, Jalan Instalasi dan Jaringan dan aset tetap lainnya sebesar 0
2. Mutasi Masuk antar SKPD sebesar 0
3. Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan 0
4. Pengakuan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dari Belanja Barang dan Jasa atau Belanja Pemeliharaan sebesar 0.
5. Koreksi Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 0.

Sedangkan Penjelasan atas rincian nilai pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan 0.. antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke aset tanah, peralatan mesin, jalan instalasi dan jaringan sebesar 0.
2. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan ke barang Extra Kompatible sebesar 0.
3. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan ke barang non aset sebesar 0.
4. Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan sebesar 0.
5. Mutasi Keluar antar SKPD Sebesar 0
6. Hibah Aset tetap Gedung dan Bangunan Kepada Masyarakat Berupa Bangunan Gedung 0
7. Reklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai sebesar 0 . pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (SKPKD)
8. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Karena Temuan Kekurangan Volume sebesar .0.

Adapun saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 69. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD

| **No** | **Uraian** | **Saldo Awal Per 31-12-2020** | **Realisasi**  **Belanja Modal 2020** | **Penyesuaian/**  **Koreksi 2020** | | **Saldo Akhir Per 31-12-**  **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tambah** | **Kurang** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(f)** | **(g)** | **(h) = c + f - g** |
| 1 | Dinas Pendidikan |  |  |  |  |  |
| 2 | Dinas Kesehatan |  |  |  |  |  |
| 3 | RSUD SKPD |  |  |  |  |  |
| 4 | RSUD BLUD |  |  |  |  |  |
| 5 | DPUPR |  |  |  |  |  |
| 6 | Dinas Perumahan dan KP |  |  |  |  |  |
| 7 | Bakesbangpol | 3.060.494.965,00 |  |  |  | 3.060.494.965,00 |
| 8 | Satpol PP |  |  |  |  |  |
| 9 | Dinsos |  |  |  |  |  |
| 10 | Dinas PPAPPKB |  |  |  |  |  |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |  |  |  |  |  |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |
| 13 | Dispendukcapil |  |  |  |  |  |
| 14 | Dinas Perhubungan |  |  |  |  |  |
| 15 | Diskominfo |  |  |  |  |  |
| 16 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |
| 17 | DPMPTSP |  |  |  |  |  |
| 18 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |  |  |  |  |  |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |  |  |  |  |  |
| 20 | Disperindag |  |  |  |  |  |
| 21 | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |
| 22 | Sekretariat Dewan |  |  |  |  |  |
| 23 | Kecamatan Prajurit Kulon |  |  |  |  |  |
| 24 | Kecamatan Magersari |  |  |  |  |  |
| 25 | Kecamatan Kranggann |  |  |  |  |  |
| 26 | Inspektorat |  |  |  |  |  |
| 27 | Bappeko |  |  |  |  |  |
| 28 | DPPKA SKPD |  |  |  |  |  |
| 29 | DPPKA SKPKD |  |  |  |  |  |
| 30 | Badan Kepegawaian |  |  |  |  |  |
| 31 | Balitbang |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **3.060.494.965,00** |  |  |  | **3.060.494.965,00** |

##### 5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Saldo Aset Tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0 dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0. dari tahun 2020 sebesar 0.. dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 70. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

| **No** | **Uraian** | **Saldo Awal Per 31-12-**  **2020** | **Realisasi**  **Belanja Modal 2020** | **Penyesuaian/**  **Koreksi 2020** | | **Saldo Akhir Per 31-12-**  **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tambah** | **Kurang** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(f)** | **(g)** | **(h) = c + f - g** |
| 1 | Jalan |  |  |  |  |  |
| 2 | Jembatan |  |  |  |  |  |
| 3 | Bangunan Air Irigasi |  |  |  |  |  |
| 4 | Bangunan Air Pasang Surut |  |  |  |  |  |
| 5 | Bangunan Air Rawa |  |  |  |  |  |
| 6 | Bangunan Pengaman Sungai dan Penangulangan Bencana Alam |  |  |  |  |  |
| 7 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah |  |  |  |  |  |
| 8 | Bangunan Air Bersih/Baku |  |  |  |  |  |
| 9 | Bangunan Air Kotor |  |  |  |  |  |
| 10 | Instalasi Air Minum / Air Bersih |  |  |  |  |  |
| 11 | Instalasi Air Kotor |  |  |  |  |  |
| 12 | Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik |  |  |  |  |  |
| 13 | Instalasi Pembangkit Listrik |  |  |  |  |  |
| 14 | Instalasi Gardu Listrik |  |  |  |  |  |
| 15 | Instalasi Gas |  |  |  |  |  |
| 16 | Instalasi Pengaman |  |  |  |  |  |
| 17 | Jaringan Air Minum |  |  |  |  |  |
| 18 | Jaringan Listrik |  |  |  |  |  |
| 19 | Jaringan Telepon |  |  |  |  |  |
| 20 | Jaringan Gas |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **NIHIL** |  |  |  | **NIHIL** |

Perhitungan saldo aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saldo per 31 Desember 2020 |  |  | **Rp** | **0** |
| Penambahan Tahun 2020 : |  |  |  |  |
| a.   Realisasi Belanja Modal | Rp | 0 |  |  |
| b.   Reklasifikasi aset | Rp | 0 |  |  |
| c.   Mutasi Masuk | Rp | 0 |  |  |
| d. Realisasi Dari Belanja Barjas | Rp | 0 |  |  |
| e. Koreksi | Rp | 0 |  |  |
|  |  |  | **Rp** | **0** |
| Jumlah |  |  | **Rp** | **0** |
| Pengurangan Tahun 2020 : |  |  |  |  |
| a.   Reklasifikasi aset | Rp | 0 |  |  |
| b.   Extracomptable | Rp | 0 |  |  |
| c.   Barang non aset | Rp | 0 |  |  |
| d.   Mutasi Keluar | Rp | 0 |  |  |
| e. Hibah | Rp | 0 |  |  |
| f. Reklas Ke Aset Lain2 | Rp | 0 |  |  |
| g. Temuan Kekurangan Volume | Rp | 0 |  |  |
|  |  |  | **Rp** | **0** |
| **Saldo per 31 Desember 2020** |  |  | **Rp** | **0** |
|  |  |  |  |  |

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar 0 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal tahun 2020 terdiri dari belanja modal SKPD sebesar 0. dengan rincian per SKPD sebagai berikut.

**Tabel 71. Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Tahun 2020**

| **No.** | **Uraian** | **Nilai** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |  |
| 2 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |  |
| 3 | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |  |
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup |  |
| 5 | Kecamatan Prajurit Kulon |  |
| 6 | Kecamatan Magersari |  |
| 7 | Kecamatan Kranggan |  |
|  | **JUMLAH** | **NIHIL** |

1. Reklasifikasi aset Jalan Irigasi dan Jaringan Dari Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan Sebesar 0
2. Mutasi Masuk antar SKPD sebesar 0.
3. Pengakuan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Dari Belanja Barang dan Jasa atau Belanja Pemeliharaan sebesar 0
4. Koreksi Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi 0

Sedangkan Penjelasan atas rincian nilai pengurangan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan 0 antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke aset tanah, peralatan mesin, Gedung dan Bangunan sebesar 0
2. Pengurangan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke barang Extra Kompatible sebesar 0
3. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan ke barang non aset sebesar 0
4. Mutasi Keluar antar SKPD Sebesar 0
5. Hibah Aset tetap Gedung dan Bangunan Kepada Masyarakat Berupa 0 Sebesar Rp 0
6. Reklasifikasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Ke Aset Lain – lain sebesar 0
7. Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan karena temuan kekurangan volume sebesar 0.

Adapun saldo aset tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan berdasarkan OPD per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 72. Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

| **No** | **OPD** | **Saldo Awal Per 31-12-2020** | **Realisasi**  **Belanja Modal 2020** | **Penyesuaian/**  **Koreksi 2020** | | **Saldo Akhir Per 31-12-**  **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tambah** | **Kurang** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(f)** | **(g)** | **(h) = c + f - g** |
| 1 | Dinas Pendidikan |  |  |  |  |  |
| 2 | Dinas Kesehatan |  |  |  |  |  |
| 3 | RSUD SKPD |  |  |  |  |  |
| 4 | RSUD BLUD |  |  |  |  |  |
| 5 | DPUPR |  |  |  |  |  |
| 6 | Dinas Perumahan dan KP |  |  |  |  |  |
| 7 | Bakesbangpol | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Satpol PP |  |  |  |  |  |
| 9 | Dinsos |  |  |  |  |  |
| 10 | Dinas PPAPPKB |  |  |  |  |  |
| 11 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |  |  |  |  |  |
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |
| 13 | Dispendukcapil |  |  |  |  |  |
| 14 | Dinas Perhubungan |  |  |  |  |  |
| 15 | Diskominfo |  |  |  |  |  |
| 16 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |
| 17 | DPMPTSP |  |  |  |  |  |
| 18 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |  |  |  |  |  |
| 19 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |  |  |  |  |  |
| 20 | Disperindag |  |  |  |  |  |
| 21 | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |
| 22 | Sekretariat Dewan |  |  |  |  |  |
| 23 | Kecamatan Prajurit Kulon |  |  |  |  |  |
| 24 | Kecamatan Magersari |  |  |  |  |  |
| 25 | Kecamatan Kranggan |  |  |  |  |  |
| 26 | Inspektorat |  |  |  |  |  |
| 27 | Bappeko |  |  |  |  |  |
| 28 | DPPKA SKPD |  |  |  |  |  |
| 29 | DPPKA SKPKD |  |  |  |  |  |
| 30 | Badan Kepegawaian |  |  |  |  |  |
| 31 | Balitbang |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **NIHIL** |  |  |  | **NIHIL** |

##### 5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
|  | **107.064.590** |  | **107.064.590** |

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2020 sebesar Rp 107.064.590 dan 107.064.590. dengan rincian dan mutasi tahun 2020 adalah sebagai berikut

Tabel 73. Rincian Aset Tetap Lainnya

| **No** | **Uraian** | **Permendagri 64/2013** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo Awal Per 31-12-2019** | **Realisasi Belanja Modal 2020** | **Penyesuaian/ Koreksi 2020** | | **Saldo Akhir Per 31-12-2020** |
|
| **Tambah** | **Kurang** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(f)** | **(g)** | **(h) = c + f - g** |
| 1 | Bahan Perpustakaan Tercetak |  |  |  |  |  |
| 2 | Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro |  |  |  |  |  |
| 3 | Kartografi, Naskah dan Lukisan |  |  |  |  |  |
| 4 | Karya Grafika (Graphic Material) |  |  |  |  |  |
| 5 | Three Dimensional Artefacs and Realita |  |  |  |  |  |
| 6 | Barang Bercorak Kesenian |  |  |  |  |  |
| 7 | Alat Bercorak Kebudayaan | 91.985.240,00 | 15.079.350,00 |  |  | 107.064.590,00 |
| 8 | Hewan Piaraan |  |  |  |  |  |
| 9 | Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) |  |  |  |  |  |
| 10 | Tanaman |  |  |  |  |  |
| 11 | Aset Tetap Dalam Renovasi |  |  |  |  |  |
| 12 | Aset Tetap BLUD/FKTP |  |  |  |  |  |
| 13 | Aset Tetap BOS |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **91.985.240,00** | **15.079.350,00** |  |  | **107.064,590,00** |

Perhitungan saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp 107.064.590,00 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo per 31 Desember 2020** |  |  | **Rp** | **91.985.240,00** |
| Penambahan Tahun 2020 : |  |  |  |  |
| a.   Realisasi Belanja Modal | Rp | 15.079.350,00 |  |  |
| b.   Reklasifikasi aset | Rp | 0 |  |  |
|  |  |  | Rp | 15.079.350,00 |
| **Jumlah** |  |  | **Rp** | **107.064.590.00** |
| Pengurangan Tahun 2020 : |  |  |  |  |
| a.   Reklasifikasi aset | Rp | 0 |  |  |
| b.   Extracomptable | Rp | 0 |  |  |
|  |  |  | Rp | 0 |
| **Saldo per 31 Desember 2020** |  |  | **Rp** | **107.064.590,00** |

Penjelasan atas penambahan aset tetap lainnya pada Tahun 2020 sebesar Rp.15.079.350,00 adalah sebagai berikut:

Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut :

1. Penambahan aset tetap lainnya dari belanja modal Tahun 2020 sebesar Rp.15.079.350,00 dapat diuraikan dalam rincian SKPD sebagai berikut :

Tabel 74. Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun 2020

| **No** | **Satuan Kerja** | **Jumlah** |
| --- | --- | --- |
| **(Rp)** |
| 1 | Dinas Pendidikan |  |
| 2 | Dinas Kesehatan |  |
| 3 | RSU Dr. Wahidin Sudiro Hudoso (BLUD) |  |
| 4 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 15.079.350,00 |
| 5 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata |  |
| 6 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |  |
| 7 | Bag. Hukum |  |
| 8 | Kecamatan Prajurit Kulon |  |
| **Jumlah** | | **15.079.350,00** |

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi belanja Modal sebesar 0

Penjelasan atas pengurangan aset tetap lainnya pada Tahun 2020 sebesar 0 dapat diuraikan dalam rincian SKPD berikut ini.

Tabel 75. Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya

| **No** | **Satuan Kerja** | **Jumlah** |
| --- | --- | --- |
| **(Rp)** |
| 1 | Dinas Pendidikan |  |
| 2 | Dinas Kesehatan |  |
| 3 | RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo (BLUD) |  |
| 4 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata |  |
| 5 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |  |
| 6 | Kecamatan Prajurit Kulon |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** |

Sehingga saldo akhir aset tetap berupa Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 76. Rincian Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per OPD

| **No** | **OPD** | **Saldo Awal Per 31-12-2019** | **Realisasi Belanja Modal 2020** | **Penyesuaian/ Koreksi 2020** | | **Saldo Akhir Per 31-12-2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Tambah** | **Kurang** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(f)** | **(g)** | **(h) = c + f - g** |
| 1 | Dinas Pendidikan |  |  |  |  |  |
| 2 | Dinas Kesehatan |  |  |  |  |  |
| 3 | RSU Dr. Wahidin Sudiro Hudoso (BLUD) |  |  |  |  |  |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |  |  |  |  |  |
| 5 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 91.985.240,00 | 15.079.350,00 |  |  | 107.064.590,00 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja |  |  |  |  |  |
| 7 | Dinas Sosial |  |  |  |  |  |
| 8 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |  |  |  |  |  |
| 9 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata |  |  |  |  |  |
| 10 | Dinas Perpustakaan dan Arsip |  |  |  |  |  |
| 11 | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |
| 12 | Sekretariat Dewan |  |  |  |  |  |
| 13 | Kecamatan Prajurit Kulon |  |  |  |  |  |
| 14 | Kecamatan Magersari |  |  |  |  |  |
| 15 | Kecamatan Kranggan |  |  |  |  |  |
| 16 | Inspektorat |  |  |  |  |  |
| 17 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPD) |  |  |  |  |  |
| 18 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPKD) |  |  |  |  |  |
| 19 | Badan Penelitian Dan Pengembangan |  |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | | **91.985.240,00** | **15.079.350,00** |  |  | **107.064.590,00** |

##### 5.3.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2020 sebesar Rp 0 dan 0. terdiri dari :

Tabel 77. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

| **No** | **Uraian** | **Permendagri 64/2013** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo Awal Per 31-12-2020** | **Realisasi Belanja Modal 2020** | **Penyesuaian/ Koreksi 2020** | | **Saldo Akhir Per 31-12-2020** |
|
| **Tambah** | **Kurang** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(f)** | **(g)** | **(h) = c + f - g** |
| 1 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkampungan |  |  |  |  |  |
| 2 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung |  |  |  |  |  |
| 3 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja |  |  |  |  |  |
| 4 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Peringatan |  |  |  |  |  |
| 5 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan |  |  |  |  |  |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan |  |  |  |  |  |
| 7 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi |  |  |  |  |  |
| 8 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam |  |  |  |  |  |
| 9 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor |  |  |  |  |  |
| 10 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor |  |  |  |  |  |
| 11 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** |  |  |  | **NIHIL** |

Perhitungan saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |
| Saldo per 31 Desember 2020 |  |  | Rp | **0** | |
| Penambahan Tahun 2020 : |  |  |  |  | |
| a. Reklasifikasi aset | Rp | 0 |  |  | |
| b. Realisasi Dari Belanja Barjas | Rp | 0 |  |  | |
|  |  |  | Rp | 0 | |
| Jumlah |  |  | Rp | 0 | |
| Pengurangan Tahun 2020 : |  |  |  |  | |
| a.   Reklasifikasi ke Aset Tetap | Rp | 0 |  |  | |
|  |  |  | Rp | 0 | |
| **Saldo per 31 Desember 2020** |  |  | **Rp** | **0** | |

Penjelasan atas aset konstruksi dalam pengerjaan pada Tahun 2020 sebesar 0.

Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut :

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap sebesar 0. berupa aset tetap gedung dan bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi yang masih belum dapat dikelompokkan sebagai aset tetap dikarenakan pekerjaan fisik belum 100% dan/atau belum dioperasionalkan. Berikut daftar penambahan KDP berdasarkan SKPD :

Tabel 78. Rincian Penambahan KDP dari Reklasifikasi Belanja Modal

| **NO** | **SKPD** | **NILAI** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **JUMLAH** | **NIHIL** |

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari reklasifikasi aset sebesar 0 berupa gedung dan bangunan , Jalan Jaringan dan Irigasi ke KDP. Berikut daftar penambahan KDP dari reklasifikasi aset tetap :

Tabel 79. Rincian Penambahan KDP dari Reklasifikasi Aset Tetap

| **NO** | **SKPD** | **NILAI** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **JUMLAH** | **NIHIL** |

1. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Belanja Barang dan jasa sebesar 0

Sedangkan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar 0. merupakan nilai akumulasi pembangunan beberapa aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang sampai dengan tahun 2019 yang telah selesai dan dioperasionalkan pada tahun 2020.

* + - 1. Berdasarkan Permendagri 108/2016

Penyesuaian aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar 0., sehingga dapat dikatakan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak mengalami perubahan penyesuaian karena adanya Permendagri 108/2016.

Sehingga saldo akhir aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan OPD per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 80. Rincian Saldo Akhir KDP per OPD

| **No** | **OPD** | **Permendagri 64/2013** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo Awal Per 31-12-2020** | **Realisasi Belanja Modal 2020** | **Penyesuaian/**  **Koreksi 2020** | | **Saldo Akhir Per 31-12-2020** |
|
| **Tambah** | **Kurang** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(f)** | **(g)** | **(h) = c + f - g** |
| 1 | Dinas Pendidikan |  |  |  |  |  |
| 2 | Dinas Kesehatan |  |  |  |  |  |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |  |  |  |  |  |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |  |  |  |  |  |
| 5 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |  |  |  |  |  |
| 6 | Kecamatan Prajurit Kulon |  |  |  |  |  |
| 7 | Kecamatan Magersari |  |  |  |  |  |
| 8 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPD) |  |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | | **NIHIL** |  |  |  | **NIHIL** |

##### 5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
|  | **1.514.201.791,00** |  | **1.514.201.791,00** |

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kota Mojokerto dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) pada jenis aset tetap non tanah, tanaman dan hewan.

Pemerintah Kota Mojokerto telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 18. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar minus 0. dengan rincian dan mutasi tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 81. Rincian dan Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| **Jenis Aset** | **Saldo Awal 2020** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d) = a - b + c** |
| Peralatan Dan Mesin | 114.037.545,00 |  |  | 114.037.545,00 |
| Gedung Dan Bangunan | 70.692.332,00 |  |  | 70.692.332,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan |  |  |  |  |
| Aset Tetap Lainnya |  |  |  |  |
| **Jumlah** | **(184.729.877,00)** |  |  | **(184.729.877,00)** |

Perhitungan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar minus RP.184.729.877,00. adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saldo per 31 Desember 2020 |  |  |  |  |
| Penambahan Tahun 2020 : |  |  | Rp | **,00** |
| a.  Beban Penyusutan | Rp | 184.729.877,00 |  |  |
| b. Reklas Masuk Antar Objek | Rp | 0 |  |  |
|  |  |  | Rp | 184.729.877,00 |
| Jumlah |  |  | Rp | 184.729.877,00 |
| Pengurangan Tahun 2020 : |  |  |  |  |
| a. Penghapusan Aset Tetap | Rp | 0 |  |  |
| b. Koreksi Akumulasi Penyusutan | Rp | 0 |  |  |
| c. Reklas Masuk Antar Objek | Rp | 0 |  |  |
| d. Reklas ke Akm Pinjam Pakai | Rp | 0 |  |  |
|  |  |  | Rp | 0 |
| **Saldo per 31 Desember 2020** |  |  | **Rp** | **0** |

Penjelasan atas penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2020 sebesar Rp. 184.729.877,00 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan dari Beban Penyusutan sebesar Rp. 184.729.877,00 dapat diuraikan dalam setiap objek sebagai berikut :

**Tabel 82. Rincian Penambahan Beban Penyusutan Tahun 2020**

| **No.** | **Uraian** | **2020** |
| --- | --- | --- |
| **(Rp)** |
| 1 | Peralatan dan Mesin | 114.037.545,00 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 70.692.332,00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Jumlah** | | **184.729.877,00** |

1. Reklas masuk antar objek sebesar Rp.20.188.225. merupakan perpindahan antar objek yang terjadi pada akumulasi aset tetap.

Penjelasan atas pengurangan akumulasi aset tetap pada Tahun 2020 sebesar Rp.20.188.225 adalah sebagai berikut ini :

1. Penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar 0 dapat diuraikan dalam rincian SKPD sebagai berikut :

**Tabel 83. Rincian Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD**

| **No.** | **Uraian** | **2020** |
| --- | --- | --- |
| **(Rp)** |
| 1 | Nihil | Nihil |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| **Jumlah** | | **Nihil** |

1. Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar 0 merupakan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Mojokerto;
2. Reklas masuk antar objek sebesar 0 merupakan perpindahan antar objek yang terjadi pada aset tetap lainnya.
3. Reklas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai sebesar 0

Adapun saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berdasarkan OPD per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 84. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD

| **No** | **OPD** | **Saldo Awal Per 31-12-2020** | **Penyesuaian/ Koreksi 2020** | | **Saldo Akhir Per 31-12-2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Tambah** | **Kurang** |
| 1 | Dinas Pendidikan |  |  |  |  |
| 2 | Dinas Kesehatan |  |  |  |  |
| 3 | Rsud Dr. Wahidin Sudiro Husodo |  |  |  |  |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang |  |  |  |  |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |  |  |  |  |
| 6 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 1.248.286.674,00 | 184.729.877,00 | 0 | 1.433.016.551,00 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja |  |  |  |  |
| 8 | Dinas Sosial |  |  |  |  |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |  |  |  |  |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |  |  |  |  |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup |  |  |  |  |
| 12 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |
| 13 | Dinas Perhubungan |  |  |  |  |
| 14 | Dinas Komunikasi Dan Informatika |  |  |  |  |
| 15 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja |  |  |  |  |
| 16 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu |  |  |  |  |
| 17 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata |  |  |  |  |
| 18 | Dinas Perpustakaan Dan Arsip |  |  |  |  |
| 19 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |  |  |  |  |
| 20 | Bag. Pemerintahan |  |  |  |  |
| 21 | Bag. Hukum |  |  |  |  |
| 22 | Bag. Perekonomian |  |  |  |  |
| 23 | Bag. Pengadaan Barang/ Jasa |  |  |  |  |
| 24 | Bag. Organisasi |  |  |  |  |
| 25 | Bag. Umum |  |  |  |  |
| 26 | Bag. Humas |  |  |  |  |
| 27 | Bag. Kesra |  |  |  |  |
| 28 | Sekretariat Dewan |  |  |  |  |
| 29 | Kecamatan Prajurit Kulon |  |  |  |  |
| 30 | Kecamatan Magersari |  |  |  |  |
| 31 | Kecamatan Kranggan |  |  |  |  |
| 32 | Inspektorat |  |  |  |  |
| 33 | Badan Perencanaan Pembangunan |  |  |  |  |
| 34 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPD) |  |  |  |  |
| 35 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (SKPKD) |  |  |  |  |
| 36 | Badan Kepegawaian |  |  |  |  |
| 37 | Badan Penelitian Dan Pengembangan |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **1.248.286.678,00** | **184.729.877,00** | **0** | **1.433.016.551,00** |

1. **Aset Lainnya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **34.860.000** |  | **34.860.000** |

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp.34.860.000 dan Rp.34.860.000 terdiri atas :

***Tabel 85. Rincian Aset Lainnya***

| **No** | **Uraian** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bangun Guna serah |  |  |
| 2. | Akumulasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga |  |  |
| 3. | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 34.860.000 | 34.860.000 |
| 4. | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud |  |  |
| 5. | Aset Lain-lain |  |  |
| 6. | Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain |  |  |
| 7. | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah |  |  |
|  | **JUMLAH** | **34.860.000** | **34.860.00** |

Rincian tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 5.3.4.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0. dan 0 merupakan kemitraan dalam bentuk Bangun Guna Serah /Build Operate Transfer (BOT) atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 86. Rincian Aset untuk Bangun Guna Serah

| **No** | **Uraian** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tanah |  |  |
| 2. | Gedung Bangunan |  |  |
| 3. | Akumulasi Penyusutan |  |  |
|  | **JUMLAH** | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### 5.3.4.3 Aset Tidak Berwujud

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp.34.860.000. merupakan nilai buku atas aset tak berwujud pada tahun berkenaan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 87. Rincian Aset Tidak Berwujud

| **No** | **Uraian** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aset Tidak Berwujud |  |  |
| 2. | Amortisasi Depresiasi |  |  |
|  | **Jumlah** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Rincian tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

###### 5.3.4.3.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0. dan 0. merupakan nilai perolehan dari asset tidak berwujud, yang rinciannya dan mutasi tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 88. Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud

| **No** | **OPD** | **Permendagri 64/2013** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Saldo Awal Per 31-12-2020** | **Realisasi**  **Belanja Modal 2020** | **Penyesuaian/Koreksi 2020** | | **Saldo Akhir Per 31-12-**  **2020** |
| **Tambah** | **Kurang** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(f)** | **(g)** | **(h) = c + f - g** |
| 1. | Dinas Pendidikan |  |  |  |  |  |
| 2. | Dinas Kesehatan |  |  |  |  |  |
| 3. | RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo (SKPD) |  |  |  |  |  |
| 4. | RSU. Dr. Wahidin Sudiro Husodo (BLUD) |  |  |  |  |  |
| 5. | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |  |  |  |  |  |
| 6. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |  |  |  |  |  |
| 7. | Dinas Sosial |  |  |  |  |  |
| 8. | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan Keluarga Berencana |  |  |  |  |  |
| 9. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |  |
| 10 | Dinas Perhubungan |  |  |  |  |  |
| 11. | Dinas Komunikasi dan Informatika |  |  |  |  |  |
| 12. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |
| 13. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |  |  |  |  |
| 14. | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |  |  |  |  |  |
| 15. | Dinas Perpustakaan dan Arsip |  |  |  |  |  |
| 16. | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |
| 17 | Kecamatan Prajurit Kulon |  |  |  |  |  |
| 18 | Kecamatan Magersari |  |  |  |  |  |
| 19 | Kecamatan Kranggan |  |  |  |  |  |
| 20. | Badan Perencanaan Pembangunan |  |  |  |  |  |
| 21 | BPPKA (SKPD) |  |  |  |  |  |
| 22 | BPPKA (SKPKD) |  |  |  |  |  |
| 23 | Badan Kepegawaian |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

###### 5.3.4.3.2 Amortisasi Depresiasi

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0 merupakan nilai amortisasi penyusutan aset tidak berwujud. Sejak tahun 2014 Pemerintah Kota Mojokerto menerapkan kebijakan amortisasi aset tak berwujud. Adapun rincian nilai amortisasi depresiasi tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 89. Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud

| **No** | **OPD** | **Saldo Awal Per 31-12-2020** | **Realisasi**  **Belanja Modal 2020** | **Penyesuaian/Koreksi 2020** | | **Saldo Akhir Per**  **31-12-2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tambah | Kurang |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **(d)** | **(f)** | **(g)** | **(h) = c - f + g** |
| 1. | Dinas Pendidikan |  |  |  |  |  |
| 2. | Dinas Kesehatan |  |  |  |  |  |
| 3. | RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo (SKPD) |  |  |  |  |  |
| 4. | RSU. Dr. Wahidin Sudiro Husodo (BLUD) |  |  |  |  |  |
| 5. | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |  |  |  |  |  |
| 6. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |  |  |  |  |  |
| 7. | Dinas Sosial |  |  |  |  |  |
| 8. | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan Keluarga Berencana |  |  |  |  |  |
| 9. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |  |
| 10 | Dinas Perhubungan |  |  |  |  |  |
| 11. | Dinas Komunikasi dan Informatika |  |  |  |  |  |
| 12. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |
| 13. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |  |  |  |  |
| 14. | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |  |  |  |  |  |
| 15. | Dinas Perpustakaan dan Arsip |  |  |  |  |  |
| 16. | Sekretariat Daerah |  |  |  |  |  |
| 17 | Kecamatan Prajurit Kulon |  |  |  |  |  |
| 18 | Kecamatan Magersari |  |  |  |  |  |
| 19 | Kecamatan Kranggan |  |  |  |  |  |
| 20. | Badan Perencanaan Pembangunan |  |  |  |  |  |
| 21 | BPPKA (SKPD) |  |  |  |  |  |
| 22 | BPPKA (SKPKD) |  |  |  |  |  |
| 23 | Badan Kepegawaian |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### 5.3.4.4 Aset Lain-Lain

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 dan 2020 sebesar 0. dan 0. merupakan nilai buku dari aset lain-lain, yang terdiri dari :

Tabel 90. Rincian Aset Lain-lain dan Akumulasi

| **No** | **Uraian** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Jumlah** | **0** | **0** |

Rincian tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

###### 5.3.4.4.1 Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2020 sebesar 0 dan 0 merupakan harga perolehan dari aset lain-lain, yang terdiri dari :

Tabel 91. Rincian Aset Lain-lain

| **No** | **Uraian** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aset Rusak Berat |  |  |
| 2. | Aset Pinjam Pakai |  |  |
| 3. | Kas yang dibatasi penggunaannya |  |  |
| 4. | Aset Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat |  |  |
|  | **Jumlah** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Aset Rusak Berat

Saldo aset rusak berat per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0 merupakan harga perolehan dari aset tetap yang kondisi rusak berat, dengan rincian per SKPD dan mutasi tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 92. Rincian Aset Rusak Berat

| **Nama SKPD** | **31 Desember 2020** | **Penambahan 2020** | **Pengurangan 2020** | **31 Desember 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

1. Aset Pinjam Pakai

Saldo aset pinjam pakai per 31 Desember 2020 dan 2020 tetap sebesar 0.. dan 0. dengan rincian per SKPD dan mutasi tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 93. Rincian Aset Pinjam Pakai

| **Nama SKPD** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** | **Penambahan 2020**  **(Rp)** | **Pengurangan 2020**  **(Rp)** | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dinas Sosial |  |  |  |  |
| Sekretariat Daerah |  |  |  |  |
| BPPKA SKPKD |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | **0** | **0** | **0** | **0** |

1. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0. merupakan saldo jaminan jasa bongkar reklame yang dikelola oleh Dinas PM PTSP. Jaminan jasa bongkar reklame ini disimpan dalam rekening bank jatim dengan nomor 0821000572

1. Aset Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Saldo Aset Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 sebesar 0 yang merupakan aset yang akan diserahkan kepada masayarakat yang terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

###### 5.3.4.4.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2020 sebesar Rp 0 dan 0. merupakan akumulasi penyusutan dari aset lain-lain, yang terdiri dari :

Tabel 94. Rincian Akumulasi Aset Lain-lain

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2020** |
| **Rp** | **Rp** |
| 1. | Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat |  |  |
| 2. | Penyusutan barang sedang dalam penelusuran |  |  |
| 3. | Akumulasi Penyusutan Aset Pinjam Pakai |  |  |
| **Jumlah** | | **0** | **0** |

Tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak

Saldo akumulasi penyusutan aset rusak berat per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0., dengan rincian per SKPD dan mutasi tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 95. Rincian Akumulasi Aset Rusak Berat

| **Nama SKPD** | **31 Desember 2019** | **Penambahan 2020** | **Pengurangan 2020** | **31 Desember 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

1. Akumulasi Penyusutan Aset Pinjam Pakai

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Pinjam Pakai per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 .dan 0, dengan rincian dan mutasi tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 96. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Pinjam Pakai

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama SKPD** | **31 Desember 2020** | **Penambahan 2020** | **Pengurangan 2020** | **31 Desember 2020** |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** | **(Rp)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### 5.3.4.5 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 Pemerintah Kota Mojokerto sebesar 0 dan 0 merupakan tuntutan ganti kerugian daerah yang memiliki masa jatuh tempo melebihi satu tahun anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

| **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| --- | --- | --- |
| **Rp** | **Rp** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **JUMLAH** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Pada tahun 2020, terdapat reklasifikasi ke bagian lancar TGR sebesar 0 atas angsuran TGR yang memiliki masa jatuh tempo satu tahun ke depan.

1. **Kewajiban Jangka Pendek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Pada Tahun 2020 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Mojokerto sebesar ……………… dengan rincian :

Tabel . Rincian Kewajiban Jangka Pendek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 | Utang Perhitungan Fihak Ketiga |  |  |
| 2 | Pendapatan Diterima Dimuka |  |  |
| 3 | Utang Beban |  |  |
| 4 | Utang Jangka Pendek Lainnya |  |  |
| **JUMLAH** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

Mutasi kewajiban jangka pendek selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel . Mutasi Kewajiban Jangka Pendek

| **Jenis** | **Saldo** | **Penambahan Tahun 2020** | **Pengurangan Tahun 2020** | **Saldo** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Des 2019** | **31 Des 2020** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| Utang Perhitungan Fihak Ketiga |  |  |  |  |
| Pendapatan diterima dimuka |  |  |  |  |
| Utang Beban |  |  |  |  |
| Utang Jangka Pendek Lainnya |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Adapun penjelasan Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

##### 5.3.5.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0. terdiri dari :

Tabel . Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga

| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 | Utang PPh Pusat |  |  |
| 2 | Utang Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya |  |  |
|  | **Jumlah** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Rincian tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

###### 5.3.5.1.1 Utang PPh Pusat

Saldo Utang PPh Pusat per 31 Desember 2020 sebesar 0. merupakan 0.

###### 5.3.5.1.2 Utang Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar 0. merupakan 0 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya

| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### 5.3.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0 terinci sebagai berikut :

Tabel . Rincian Pendapatan Diterima di Muka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### 5.3.5.3 Utang Beban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Utang beban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Utang beban dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, kewajiban kepada masyarakat dan kewajiban kepada pemberi jasa.

Saldo utang beban per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0 terdiri dari:

Tabel . Rincian Utang Beban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 | Utang Beban Pegawai |  |  |
| 2 | Utang Beban Barang dan Jasa |  |  |
| **Jumlah** | | **0** | **0** |

Uraian tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut.

###### 5.3.5.3.1 Utang Beban Pegawai

Saldo utang beban pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0. terinci sebagai berikut :

Tabel . Rincian Utang Beban Pegawai

| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 | Tambahan Penghasilan |  |  |
| 2 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah |  |  |
| 3 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

Penjelasan saldo tersebut adalah sebagai berikut.

###### 5.3.5.3.2 Utang Beban Barang dan Jasa

Saldo utang beban barang dan jasa per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0. terinci sebagai berikut :

Tabel . Rincian Utang Beban Pegawai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 | Bahan Obat-Obatan |  |  |
| 2 | Jasa Pelayanan Kesehatan |  |  |
| 3 | Premi Asuransi |  |  |
| 4 | Beban Listrik |  |  |
| 5 | Jasa Transaksi Keuangan |  |  |
| 6 | Jasa Konsultan Pengawas |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

Penjelasan saldo tersebut adalah sebagai berikut:

##### 5.3.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0. dan 0, terinci sebagai berikut :

Tabel . Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** |

Uraian tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut.

###### 5.3.5.4.1 Utang kelebihan Pembayaran Transfer

Utang kelebihan pembayaran transfer merupakan 0. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 |  |  | - |
| 2 |  |  | - |
| 3 |  |  | - |
| 4 |  |  | - |
| 5 |  |  | - |
| 6 |  |  | - |
| 7 |  |  | - |
| 8 |  |  | - |
| 9 |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL -** |

###### 5.3.5.4.2 Utang Pengadaan Aset Tetap

Saldo pengadaan utang pengadaan aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar 0. dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 108. Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **U R A I A N** | **JUMLAH (Rp)** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| **Total** | | **NIHIL** |

###### 5.3.5.4.1 Utang Jangka Pendek Lain-Lain

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar 0 merupakan jaminan jasa bongkar pada Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu.

Jaminan Jasa bongkar ini adalah merupakan uang titipan atas biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Kota Mojokerto yang akan digunakan sebagai biaya bongkar reklame jika masa pemasangan reklame telah berakhir.

1. **Ekuitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Desember 2020**  **(Rp)** |  | **31 Desember 2019**  **(Rp)** |
|  | **3.454.558.647** |  | **3.600.393.175** |

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 3.454.558.647. dan 3.600.393.175., dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . Rincian Ekuitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **31 Des 2020** | **31 Des 2019** |
| **Rp** | **Rp** |
| 1 | Saldo Awal Ekuitas | 3.600.393.175 | 3.584.745.750 |
| 2 | Surplus/(Defisit) LO | (4.840.586.270) | (6.959.064.550 ) |
| 3 | Koreksi Ekuitas | 0 | 0 |
|  | **Jumlah** | **3.454.558.647** | **3.600.393.175** |

Adapun penjelasan koreksi ekuitas secara lebih terinci, terdapat pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

1. **LAPORAN OPERASIONAL**

#### 5.4.1 Pendapatan - LO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Mojokerto yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO per 31 Desember 2020 adalah sebesar 0..jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan-LO pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0..%, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Rincian Pendapatan LO

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1. | Pendapatan Asli Daerah-LO |  |  |  |  |
| 2. | Pendapatan Transfer-LO |  |  |  |  |
| 3. | Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Pendapatan asli daerah-LO pada tahun 2020 adalah sebesar 0 atau mengalami kenaikan sebesar 0.% dari tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel . Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA** |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1. | Pajak Daerah-LO |  |  |  |  |
| 2. | Retribusi Daerah-LO |  |  |  |  |
| 3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO |  |  |  |  |
| 4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO merupakan pendapatan yang mengalami peningkatan terbesar jika dibandingkan dengan jenis pendapatan lainnya yaitu sebesar 0 %.

###### 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2020 sebesar …………. yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1. | Pajak Hotel-LO |  |  |  |  |
| 2. | Pajak Restoran-LO |  |  |  |  |
| 3. | Pajak Hiburan-LO |  |  |  |  |
| 4. | Pajak Reklame-LO |  |  |  |  |
| 5. | Pajak Penerangan Jalan-LO |  |  |  |  |
| 6. | Pajak Parkir-LO |  |  |  |  |
| 7. | Pajak Air Tanah-LO |  |  |  |  |
| 8. | Pajak Mineral Bukan Logam Batuan-LO |  |  |  |  |
| 9. | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO |  |  |  |  |
| 10. | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Perhitungan Pendapatan Pajak-LO Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel . Perhitungan Pendapatan Pajak - LO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **LRA** | **Piutang Awal** | **Piutang Akhir** | **Pendapatan Diterima Dimuka Awal** | **Pendapatan Diterima Dimuka Akhir** | **Koreksi** | **LO** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 3 - 4 + 5 + 6 - 7 + 8 |
| 1. | Pajak Hotel-LO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pajak Restoran-LO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pajak Hiburan-LO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pajak Reklame-LO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pajak Penerangan Jalan-LO |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pajak Parkir-LO |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pajak Air Tanah-LO |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | PBB-P2-LO |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | BPHTB-LO |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Berikut rincian masing-masing pendapatan pajak daerah-LO tahun 2020 adalah sebagai berikut:

###### 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan retribusi daerah-LO sebesar 0. pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.% dari tahun sebelumnya, Dari ketiga jenis pendapatan retribusi, retribusi jasa usaha-LO mengalami peningkatan terbesar 0..%, Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel . Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1. | Retribusi Jasa Umum-LO |  |  |  |  |
| 2. | Retribusi Jasa Usaha-LO |  |  |  |  |
| 3. | Retribusi Perizinan Tertentu-LO |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum-LO

Retribusi jasa umum-LO tahun 2020 sebesar 0. terdiri dari:

Tabel . Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO |  |  |  |  |
| 2 | Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum-LO |  |  |  |  |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pasar-LO |  |  |  |  |
| 4 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO |  |  |  |  |
| 5 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO |  |  |  |  |
| 6 | Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang-LO |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

1. Retribusi Jasa Usaha-LO

Retribusi jasa usaha-LO sebesar 0. terdiri dari:

Tabel . Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO |  |  |  |  |
| 2 | Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO |  |  |  |  |
| 3 | Retribusi Rumah Potong Hewan-LO |  |  |  |  |
| 4 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

1. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Retribusi perizinan tertentu-LO sebesar 0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)-LO |  |  |  |  |
| 2 | Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian-LO |  |  |  |  |
| 3 | Retribusi Izin Trayek-LO |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Perhitungan Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel . Perhitungan Pendapatan Retribusi – LO

| **No.** | **Uraian** | **LRA** | **Piutang 2019** | **Piutang 2020** | **Pendapatan Diterima Dimuka 2019** | **LO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3-4+5+6 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO |  |  |  |  |  |
| 2 | Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum-LO |  |  |  |  |  |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pasar-LO |  |  |  |  |  |
| 4 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO |  |  |  |  |  |
| 5 | Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang-LO |  |  |  |  |  |
| 6 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO |  |  |  |  |  |
| 7 | Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO |  |  |  |  |  |
| 8 | Retribusi Rumah Potong Hewan-LO |  |  |  |  |  |
| 9 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO |  |  |  |  |  |
| 10 | Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)-LO |  |  |  |  |  |
| 11 | Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian-LO |  |  |  |  |  |
| 12 | Retribusi Izin Trayek-LO |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

###### 5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO sebesar 0. merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kota Mojokerto, yaitu:

Tabel . Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1. | Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah - LO |  |  |  |  |
| 2. | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD -LO |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

###### Perbedaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LRA** | **………………..** |
| Koreksi atas penilaian dengan metode ekuitas 31 Desember 2019 | ……………….. |
| Saldo penyertaan modal TA 2020 | ……………….. |
| Koreksi atas Nilai Ekuitas PT. BPRS Tahun 2020 | ……………..... |
| **Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO** | **………………..** |

###### 5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah-LO tahun 2020 sebesar 0 terdiri dari:

Tabel . Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Rincian masing-masing Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO tahun 2020 adalah sebagai berikut:

##### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer -LO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada tahun 2020 adalah sebesar 0, yang terdiri dari:

Tabel . Rincian Pendapatan Transfer – LO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Transfer Pemerintah Pusat-LO |  |  |  |  |
| 2. | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO |  |  |  |  |
| 3. | Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO |  |  |  |  |
| 4. | Bantuan Keuangan-LO |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Rincian masing-masing jenis pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:

###### 5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LO

Transfer pemerintah pusat -LO sebesar 0 terdiri dari:

Tabel . Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

###### 5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Transfer pemerintah pusat lainnya-LO pada tahun 2020 sebesar 0..terdiri dari 0.

###### 5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO pada tahun 2020 sebesar 0 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO, Hal ini mengalami kenaikan sebesar 0. atau 0% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0.. Perbedaan antara pendapatan pemerintah daerah lainnya LO dan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA** | **………………..** |
| Piutang 2019 | ……………….. |
| Piutang 2020 | ……………… |
| **Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO** | **……………….** |

###### 5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan - LO

Bantuan keuangan-LO pada tahun 2020 sebesar 0 terdiri dari 0

##### 5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO tahun 2020 sebesar 0. merupakan Pendapatan Hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun pihak lainnya, Hal ini mengalami kenaikan sebesar 0 % atau dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0.

###### 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2020 sebesar 0 terdiri dari:

Tabel . Rincian Pendapatan Hibah – LO

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1. | Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO |  |  |  |  |
| 2. | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO |  |  |  |  |
| 3. | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri |  |  |  |  |
| 4. | Pendapatan Hibah Dana BOSNAS Jenjang SD dan SMP - LO |  |  |  |  |
| **JUMLAH** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

#### 5.4.2 Beban Operasional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **4.840.586.270,00** |  | **6.959.064.550,00** |

Pengakuan beban pada Tahun 2020 sebesar Rp.4.840.586.270,00. dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel . Rincian Beban Operasional

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Beban Pegawai-LO | 2.820.866.603,00 | 2.835.382.358,00 | (14.514.755,00) |
| 2 | Beban Persediaan | 213.301.475,00 | 908.405.650,00 | ( (695.104.175,00) |
| 3 | Beban Jasa | 1.294.194.514,00 | 2.269.795.113,00 | (975.600.599,00) |
| 4 | Beban Pemeliharaan | 44.005.000,00 | 255.068.336,00 | (211.063.336,00) |
| 5 | Beban Perjalanan Dinas | 281.841.300,00 | 499.584.766,00 | (217.743.466,00) |
| 6 | Beban Hibah |  |  |  |
| 7 | Beban Bantuan Sosial |  |  |  |
| 8 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 186.377.378,00 | 190.829.327,00 | (4.451.949,00) |
| 9 | Beban Penyisihan Piutang |  |  |  |
| 10 | Beban Lain-Lain |  |  |  |
| 11 | Beban Transfer |  |  |  |
| **Jumlah** | | **4.840.586.270,00** | **6.959.064.550,00** | **(2.118.478.280,00)** |

##### 5.4.2.1 Beban Pegawai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undanganan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Nilai beban pegawai pada tahun 2020 sebesar 0. mengalami kenaikan sebesar 0. atau .0..% dibandingkan dengan nilai beban pegawai Tahun 2020 yakni sebesar 0, Pengakuan beban pegawai sebesar 0 .terdiri dari:

Tabel . Rincian Beban Pegawai

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Beban Gaji dan Beban Tunjangan – LO |  |  |  |  |
| 2 | Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO |  |  |  |  |
| 3 | Beban Penerimaan Lainnya Pimp & Angg DPRD serta KDH/WKDH - LO |  |  |  |  |
| 4 | Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah |  |  |  |  |
| 5 | Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah |  |  |  |  |
| 6 | Beban Uang Lembur - LO |  |  |  |  |
| 7 | Beban Pegawai BLUD |  |  |  |  |
| 8 | Beban Pegawai BOSNAS |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Rincian masing-masing Beban Pegawai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

##### 5.4.2.2 Beban Persediaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Beban Persediaan sebesar 0 terdiri dari:

Tabel . Rincian Beban Persediaan

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Beban Bahan Pakai Habis |  |  |  |  |
| 2 | Beban Bahan/ Material |  |  |  |  |
| 3 | Beban Cetak dan Penggandaan |  |  |  |  |
| 4 | Beban Makanan dan Minuman |  |  |  |  |
| 5 | Beban Pakaian Dinas dan Atributnya |  |  |  |  |
| 6 | Beban Pakaian Kerja |  |  |  |  |
| 7 | Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu |  |  |  |  |
| 8 | Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Rincian masing-masing Beban Persediaan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

##### 5.4.2.3 Beban Jasa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Beban Jasa tahun 2020 sebesar 0 terdiri dari:

Tabel . Rincian Beban Jasa

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Beban Jasa Kantor |  |  |  |  |
| 2 | Beban Premi Asuransi |  |  |  |  |
| 3 | Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir |  |  |  |  |
| 4 | Beban Sewa Sarana Mobilitas |  |  |  |  |
| 5 | Beban Sewa Alat Berat |  |  |  |  |
| 6 | Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor |  |  |  |  |
| 7 | Beban Jasa Konsultasi |  |  |  |  |
| 8 | Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS |  |  |  |  |
| 9 | Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS |  |  |  |  |
| 10 | Beban Honorarium Non Pegawai |  |  |  |  |
| 11 | Beban Honorarium PNS - LO |  |  |  |  |
| 12 | Beban Honorarium Non PNS - LO |  |  |  |  |
| 13 | Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat |  |  |  |  |
| 14 | Beban Honorarium Pengelola Dana BOS |  |  |  |  |
| 15 | Beban Barang Dana BOS |  |  |  |  |
| 16 | Beban Barang dan Jasa BLUD |  |  |  |  |
| 17 | Belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

Rincian masing-masing Beban Jasa tahun 2020 adalah sebagai berikut:

##### 5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Beban Pemeliharaan sebesar 0 terdiri dari:

Tabel . Rincian Beban Pemeliharaan

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Beban Jasa Service |  |  |  |  |
| 2 | Beban Penggantian Suku Cadang |  |  |  |  |
| 3 | Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas |  |  |  |  |
| 4 | Beban Jasa KIR |  |  |  |  |
| 5 | Beban Pajak Kendaraan Bermotor |  |  |  |  |
| 6 | Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor |  |  |  |  |
| 7 | Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan |  |  |  |  |
| 8 | Beban Pemeliharan Tanah |  |  |  |  |
| 9 | Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin |  |  |  |  |
| 10 | Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan |  |  |  |  |
| 11 | Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan |  |  |  |  |
| 12 | Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya |  |  |  |  |
| 13 | Beban Pemeliharaan (DAK) |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**Selisih antara belanja pemeliharaan dengan beban pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Belanja Pemeliharaan** | **…………………..** |
| Belanja Pemeliharaan BLUD | ………………….. |
| Belanja Pemeliharaan BOS | ………………….. |
| Belanja Modal yang Bukan Aset Tetap | ………………….. |
| Pengakuan Aset tetap dari belanja pemeliharaan | ………………….. |
| Persediaan 2019 | ………………….. |
| Persediaan 2020 | …………………. |
| **Beban Pemeliharaan** | **…………………..** |

##### 5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2020 adalah sebesar 0. terdiri dari:

Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah |  |  |  |  |
| 2 | Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah |  |  |  |  |
| 3 | Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri |  |  |  |  |
| 4 | Beban Akomodasi dan Transportasi |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | NIHIL | **NIHIL** |

**Selisih antara belanja perjalanan dinas dengan beban perjalanan dinas dapat dijelaskan sebagai berikut :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Belanja Perjalanan Dinas** | **………………….** |
| Belanja Perjalanan Dinas BLUD | …………………. |
| Koreksi Pengakuan Beban Perjalanan Dinas di Bagian Umum Sekretariat Daerah | …………………. |
| **Beban Pemeliharaan** | **………………….** |

##### 5.4.2.6 Beban Hibah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Pengakuan Beban hibah sebesar 0. yang terdiri atas:

Tabel . Rincian Beban Hibah

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat |  |  |  |  |
| 2 | Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan |  |  |  |  |
| 3 | Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

**Perbedaan antara beban hibah dan belanja hibah dapat dijelaskan sebagai berikut :**

##### 5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Pengakuan Beban Bantuan Sosial tahun 2020 sebesar 0 terdiri dari:

Tabel . Rincian Beban Bantuan Sosial

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** | **LRA**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Beban Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat |  |  |  |  |
| 2 | Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat |  |  |  |  |
| 3 | Beban Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan |  |  |  |  |
| 4 | Beban Bantuan Sosial kepada Mahasiswa Kurang Mampu/Berprestasi |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### 5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2020 sebesar 0 terdiri dari:

Tabel . Rincian Beban Penyusutan

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin |  |  |  |
| 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan |  |  |  |
| 3 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan |  |  |  |
| 4 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya |  |  |  |
| 5 | Beban Penyusutan Aset Lainnya |  |  |  |
| 6 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### 5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Beban Penyisihan Piutang tahun 2020 sebesar 0.terdiri dari :

Tabel . Rincian Beban Penyisihan Piutang

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan |  |  |  |
| 2 | Beban Penyisihan Piutang Lainnya |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

##### 5.4.2.10 Beban Lain-Lain

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, Beban lain-lain Pemerintah Kota Mojokerto pada Tahun 2020 adalah sebesar 0. merupakan beban dari barang Ektrakompatibel.

##### 5.4.2.1 Beban Transfer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Beban Transfer tahun 2020 sebesar 0. terdiri dari :

Tabel . Rincian Beban Transfer

| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi |  |  |  |
| 2 | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pihak Lainnya |  |  |  |
| 3 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi |  |  |  |
| 4 | Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik |  |  |  |
| **Jumlah** | | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |

#### 5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31 Des 2020**  **(Rp)** |  | **31 Des 2019**  **(Rp)** |
|  | **(4.840.586.270,00)** |  | **(6.959.064.550,00)** |

Surplus Dari Kegiatan Operasional sebesar tahun 2020 dan 2019 sebesar 4.840.586.270,00 dan 6.959.064.550 .terinci sebagai berikut:

Tabel . Rincian Surplus/ Defisit d ari Kegiatan Operasional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Pendapatan - LO | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Beban Operasional | 4.840.586.270,00 | 6.959.064.550,00 | (2.118.478.280,00) |
| **Jumlah** | | 4.840.586.270,00 | 6.959.064.550,00 | (2.118.478.280,00) |

#### 5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **31 Des 2020**  **(Rp)** |  | **31 Des 2019**  **(Rp)** |
| **0** |  | **0** |

Surplus Dari Kegiatan Operasional sebesar tahun 2020 dan 2019 sebesar 0 dan 0. yang merupakan Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar 0. dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO sebesar 0.

#### 5.4.5 Surplus/Defisit Pos Luar Biasa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Pada tahun 2020 tidak terdapat surplus/defisit pos luar biasa.

#### 5.4.6 Surplus/Defisit LO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **( 4.840.586.270,00)** |  | **( 6.959.064.550,00)** |

Pada tahun 2020 mengalami Surplus LO sebesar ( 4.840.586.270,00). dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Rincian Surplus/ Defisit LO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2020** | **2019** | **Kenaikan/** |
| **(Rp)** | **(Rp)** | **(Penurunan) (%)** |
| 1 | Surplus / Defisit Kegiatan Operasional | ( 4.840.586.270,00) | (6.959.064.550,00) | 2.118.478.280 |
| 2 | Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Surplus / Defisit Pos Luar Biasa | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | ( 4.840.586.270,00) | (6.959.064.550,00) | 2.118.478.280 |

1. **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan,

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.6.1 Ekuitas Awal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **3.600.393.175,00** |  | **3.584.745.750,00** |

Saldo awal ekuitas pada neraca *audited* tahun sebelumnya.tahun 2020 dan 2019 sebesar 3.600.393.175,00. dan Rp 3.584.745.750,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya

#### 5.6.2 Surplus/Defisit LO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **( 4.840.586.270,00)** |  | **(6.959.064.550,00)** |

Surplus/defisit – LO tahun 2020 dan 2019 sebesar 4.840.586.270,00 dan 6.959.064.550,00 merupakan nilai surplus pada Laporan Operasional Tahun 2020 dan 2019 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Mojokerto tahun berkenaan.

#### 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah tahun 2020, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Tahun 2020** | **Tahun 2019** |
| 1 | Koreksi Nilai Persediaan | 0 | 0 |
| 2 | Selisih Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| 3 | Koreksi Ekuitas Lainnya | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **0** | **0** |

Penjelasan tabel di atas adalah sebagai berikut

##### 5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Koreksi nilai persediaan tahun 2020 sebesar 0 terdiri dari :

Tabel . Rincian Koreksi Nilai Persediaan Th 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Tahun 2020** | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| **Jumlah** | | | **NIHIL** | |

Sedangkan koreksi nilai persediaan tahun 2019 sebesar 0 terdiri dari :

Tabel . Rincian Koreksi Nilai Persediaan Th 2019

| **No** | **Uraian** | **Tahun 2019** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| **Jumlah** | | | **NIHIL** | |

##### 5.6.3.2 Koreksi Ekuitas Lainnya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **0** |  | **0** |

Koreksi tambah atas nilai ekuitas akhir dari koreksi ekuitas lainnya tahun 2020 dan 2019 sebesar 0 .dan 0 yang terdiri atas :

Tabel . Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2020** | **2019** |
| **(Rp)** | **(Rp)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Jumlah** | **NIHIL** | **NIHIL** |

#### 5.6.4 Ekuitas Akhir

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tahun 2020**  **(Rp)** |  | **Tahun 2019**  **(Rp)** |
|  | **3.454.558.647,00** |  | **3.600.393.175,00** |

Saldo ekuitas akhir tahun 2020 dan 2019 sebesar 3.454.558.647,00 dan 3.600.393.175,00. merupakan saldo akhir ekuitas tahun berkenaan pada neraca *audited* tahun berkenaan.

**BAB VI**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN**

* 1. **Informasi Tambahan**

**6.1.1**.Menyajikan Informasi Tambahan

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Penataan kelembagaan Pemerintahan Daerah merupakan konsekwensi logis dari perubahan mendasar sistem Pemerintahan Daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi, pemerintah daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat (dinas, badan dan lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah dinas, badan, dan lembaga teknis serta sub-substruktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

* 1. **Pengungkapan Lainnya**
     1. **Domisili**

Kota Mojokerto secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada 50 km dari Kota Surabaya. Kota Mojokerto dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berubah lagi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, sebagai bagian wilayah pengembangan Gerbangkertosusila. Sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Mojokerto , Luas Wilayah Kotamdya Mojokerto menjadi 16,46 Km2 yang terdiri atas dua wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajurit Kulon dengan 18 Desa/ Kelurahan. Pada tahun 2016 berdasarkan surat dari Kemendagri No. 138/2058/BAK tanggal 18 April 2016 dibentuk kecamatan baru yaitu kecamatan kranggan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berubah nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto.

Kota Mojokerto terletak di tengah – tengah Kabupaten Mojokerto sedangkan secara administratif, Kota Mojokerto mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Sungai Brantas

b. Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto

c. Sebelah Selatan : Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

d. Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

**Tugas pokok dan fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 5 Tahun 2012 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Keputusan Walikota Mojokerto No.32 Tahun 2013 tentang penjabaran Uraian tugas Pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto,mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mojokerto;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

**Pasal 2**

1. Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto terdiri atas :
2. Kepala ;
3. Sekretariat ;
4. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ;
5. Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional ;
6. Bidang Politik Dalam Negeri ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional .
8. Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
9. Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 3**

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penyusunan perencanaan program, urusan keuangan, kepegawaian dan umum dan mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan Badan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang dberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
3. Penyusunan rencana kegiatan dan program Badan;
4. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban;
5. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
6. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
7. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
8. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
9. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan.

**Pasal 4**

* 1. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  2. Sub Bagian Penyusunan Program
  3. Sub Bagian Keuangan
  4. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  5. Sub bagian-sub bagian dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Pasal 5**

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

* 1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  3. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana badan;
  4. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Badan;
  5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program kerja dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  6. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 6**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

* + - * 1. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;
        2. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran badan ;
        3. Mengurus pembayaran gaji, keuangan perjalanan dinas dan keuangan lainnya ;
        4. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
        5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 7**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

* + - * 1. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
        2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian ;
        3. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat ;
        4. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang milik dinas serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ;
        5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 8**

Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang dberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang pembinaan ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan;
3. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pembinaan ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan;
4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 9**

* 1. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
     + - 1. Sub Bidang Ideologi
         2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
  2. Sub bidang-sub bidang dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

**Pasal 10**

Sub Bidang Ideologi mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan dan menghimpun data dalam rangka menyusun program kerja Sub Bidang ideologi;
2. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang ketahanan ideologi negara, dan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
3. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang ketahanan ideologi negara, bela negara, wawasan kebangsaan, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
4. Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur dibidangketahanan ideologi negara dan bela negara;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 11**

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun program kerja Sub Bidang wawasan kebangsaan;

Menyiapkan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang wawasan kebangsaan, sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan penelitian di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang wawasan kebangsaan untuk cinta kepada tanah air dan Bangsa Indonesia;

Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur dibidangwawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 12**

(1) Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kewaspadaan nasional serta melaksanakan tugas-tugas lain yang dberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

* 1. Perencanaan bidang ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kewaspadaan nasional;
  2. Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan seni, budaya, agama dan aliran kepercayaan masyarakat, ekonomi dan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  3. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni, budaya, agama dan aliran kepercayaan masyarakat, ekonomi dan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  4. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 13**

* 1. Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Ketahanan Bangsa
2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
   1. Sub bidang-sub bidang dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional.

**Pasal 14**

Sub Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan dan menghimpun data dalam rangka menyusun rencana kerja sub bidang Ketahanan Bangsa;
2. Menyiapkan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan seni, budaya, agama dan aliran kepercayaan masyarakat, pembauran dan akulturasi budaya, dan ketahanan ekonomi;
3. Melaksanakan kegiatan dibidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, dan ketahanan ekonomi;
4. Menyiapkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidangketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, dan ketahanan ekonomi;
5. Menyiapkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, dan ketahanan ekonomi;
6. Menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dibidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, dan ketahanan ekonomi;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 15**

Sub Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan dan dan menghimpun data dalam rangka menyusun rencana kerja sub bidang Kewaspadaan Nasional;
2. Menyiapkan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
3. Melaksanakan kegiatan dibidang bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
4. Menyiapkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
5. Menyiapkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
6. Menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 16**

(1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat;
3. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi,fasilitasi dan penyelenggaraan pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat;
4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan politik dan kelembagaan politik masyarakat; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 17**

* 1. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

b.Sub Bagian Pembinaan Politik

* 1. Sub bidang-sub bidang dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Politik Dalam Negeri.

**Pasal 18**

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :

1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga;
2. Menyusun program fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif dan partai politik, organisasi kemasyarakan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
3. Mengkoordinasikan tugas dan program hubungan antar lembaga dengan instansi dan atau lembaga terkait;
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan program hubungan antar lembaga lembaga;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 19**

Sub Bidang Pembinaan Politik mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan dan menghimpun data dalam rangka menyusun program kerja sub bidang Pembinaan Politik;
2. Menyiapkan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik;
3. Menyiapkan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat serta fasilitasi pemilu;
4. Menyiapkan penyelenggaraan forum dialog partai politik;
5. Menyiapkan penyelenggaraan seminar dan lokakarya bidang politik;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 20**

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku

ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior.
2. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
3. Pembinaan terhadap tenaga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 21**

1. Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
2. Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 24**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Mojokerto  pada tanggal  WALIKOTA MOJOKERTO  ABDUL GANI SOEHARTONO |

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR: TAHUN 2013

TANGGAL : 2013



WALIKOTA MOJOKERTO

ABDUL GANI SOEHARTONO

* + 1. **Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan**

**Operasional**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasin Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 1/E) ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor 2/).
    * 1. **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah terdiri dari SKPD yaitu:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas yaitu:
   * + 1. Dinas Pendidikan
       2. Dinas Kesehatan
       3. Dinas Pekerjaan Umum
       4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
       5. Dinas Sosial
       6. Dinas Perhubungan
       7. Dinas Komunikasi dan Informatika
       8. Dinas Perpustakaan dan Arsip
       9. Satuan Polisi Pamong Praja
       10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
       11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
       12. Dinas Lingkungan Hidup
       13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan TenagaKerja
       14. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
       15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
       16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
       17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5. Badan yaitu:
   * + 1. Badan Perencanaan Pembangunan
       2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
       3. Badan Kepegawaian
       4. Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Kecamatan yaitu :
   * + 1. Kecamatan Magersari
       2. Kecamatan Prajurit Kulon
       3. Kecamatan Kranggan

**BAB VII**

**PENUTUP**

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Mojokerto Tahun 2020 secara keseluruhan.